

**SKRIPSI**

**MODALITASS HAMZAH HAFID DALAM KONTESTASI POLITIK  
(STUDI KASUS KETERPILIHAN KEPALA DESA DI DESA BATANG)**

**DISUSUN DAN DI USULKAN OLEH:**

**RURUL ASHARI**

**NOMOR STAMBUK: 105641101418**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2024**

**MODALITASS HAMZAH HAFID DALAM KONTESTASI POLITIK  
(STUDI KASUS KETERPILIHAN KEPALA DESA DI DESA BATANG)**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)

Disusun dan di usulkan oleh:

**RURUL ASHARI**

**105641101418**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian : Modalitas Hamzah Hafid Dalam Kontestasi Politik  
(Studi Kasus Keterpilihan Kepala Desa Di Desa Batang  
Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba

Nama : Rurul Ashari

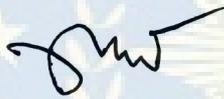
Nomor Stanbuk : 105641101418

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Amir Muhiddin, M.Si

Pembimbing II



Muhammad Randy Akbar, S.IP., M.Si

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Hj. Hyani Malik, S.Sos., M.Si  
NBM. 730727

Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan



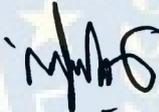
Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I  
NBM.1207 163

## HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0283/FSP/ A.4-II/VII/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dengan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari Selasa, Tanggal 30 Juli 2024.

Mengetahui

KetuaSekretaris

  
**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si**  
NBM. 730727

  
**Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si**  
NBM. 992797

Tim Penguji

1. Dr. Amir Muhidin, M.Si (  )
2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd (  )
3. Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP (  )
4. Muhammad Randhy Akbar, SIP., M.Si (  )

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rurul Ashari

Nomor Induk mahasiswa : 105641101418

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar proposal penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar,

Yang Menyatakan,

Rurul Ashari

## ABSTRAK

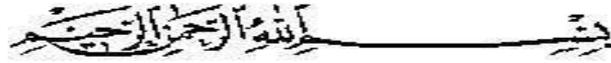
### **RURUL ASHARI 2024 : Modalitass Hamzah Hafid Dalam Kontestasi Politik (Studi Kasus Keterpilihan Kepala Desa Di Desa Batang (Di Bimbing Oleh Amir Muhiddin Dan Muhammad Randy Akbar)**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kemenangan Hamzah Hafid sebagai Kepala Desa Batang, Kec Bontotiro, Kab Bulukumba. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu Kepala Desa Batang, Sekertaris Desa Batang, Tokoh Pemuda Desa Batang, Masyarakat Desa Batang.

Dari segi **indikator modal ekonomi**, Kepala Desa terpilih hanya mengeluarkan modal untuk konsumsi tim seperti kopi dan lain-lain beserta alat peraga seperti baliho dan kartu nama. Dari segi **indikator modal Budaya** Desa terpilih, memiliki keluarga yang dominan di Desa Batang dan public speaking yang baik ke masyarakat, kebijaksanaan yang sangat bagus serta sering tampil di semua lapisan masyarakat, . Dari segi **indikator modal Sosial**, Kepala Desa terpilih adalah berasal dari keluarga serta sahabat yang menjadi pendorong utama Hamza Hafid dalam mencalonkan sebagai Kepala Desa, Hamza hafid terpilih sebagai Kepala Desa Batang dengan perolehan suara 90% dari total dpt Desa Batang. Dari segi **indikator modal simbolik** Kepala Desa terpilih, adalah melalui investasi sosial di semua kelas Masyarakat, juga partisipasi.

**Kunci:**Modalitass Hamzah Hafid, Kontestasi Politik, Keterpilihan Kepala Desa Di Desa Batang

## KATA PENGANTAR



**“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”**

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga meski harus melewati perjuangan yang panjang dan cukup melelahkan namun penulis skripsi yang berjudul : Modalitass Hamzah Hafid Dalam Kontestasi Politik (Studi Kasus Keterpilihan Kepala Desa Di Desa Batang Di Kabupaten Bulukumba

Skripsi ini adalah tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Sebagai bentuk karya ilmiah penulis menyadari bahwa banyak menghadapi hambatan dan tantangan selama dalam penelitian dan penulisan skripsi ini .

Selanjutnya pada kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada :

1. Secara khusus dan istimewa penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua saya Ayahanda Rusdin dan Ibunda Azira yang telah mendidik dan membimbing saya dari kecil hingga dewasa dan selalu memberikan dukungan yang sangat berharga.

2. Dr. Amir Muhiddin, M.SI selaku pembimbing I yang telah sabar dan tak kenal lelah dalam membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Randy Akbar, S.IP M.Si selaku pembimbing II yang tak kenal lelah membimbing dan mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. DR. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan.
7. Ibu Nur Khaerah S.IP., M.IP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan.
8. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Seluruh Civitas akademik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
10. Kepala Desa Batang, yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan bantuan selama penulis melakukan penelitian.
11. Pimpinan komisariat IMM fisip Unismuh Makassar yang telah menjadi keluarga saya dan selalu memberikan support dan membantu penulis selama kuliah

12. Kakanda Asri dan Adinda Teman-Teman dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan ( HIMJIP ) yang tidak lupa memberikan support dan membantu penulis selama kuliah.

Terlalu banyak orang yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, sehingga tidak akan muat bila dicantumkan dan dituturkan semuanya dalam ruang yang terbatas ini, kepada mereka semua tanpa terkecuali penulis ucapkan terimakasih yang teramat dalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Akhir kata penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca guna menambah khasana ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan. Makassar, 4 Januari 2024  
Penulis Rurul Ashari.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	7
B. Modalitas.....	11
1. Modalitas Ekonomi .....	12
2. Moalitas Kultural .....	13
3. Modalitas Sosial .....	13
4. Modalitas Simbolik.....	14
C. Kontestasi Politik Pemilihan Kepala Desa.....	16
D. Kerangka Pikir .....	17
E. Fokus Penelitian.....	23
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	26
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	26
C. Informan.....	26
D. Teknik Pengumpulan Data.....	27
E. Teknik Analisis Data.....	27
F. Teknik Keabsahan Data .....	29

<b>BAB IV .....</b>	<b>31</b>
<b>A. Deskripsi Objek Penelitian .....</b>	<b>31</b>
1. Gambaran Umum Kabupaten Bulukumpa.....	31
2. Gambaran Umum Lokasi penelitian .....	35
3. Gambaran Khusus Pemenangan Hamzah Hafid Dalam Kontestasi Politik (Studi Kasus Keterpilihan Kepala Desa Di Desa Batang	36
<b>B. Modalitas Sosial Hamzah Hafid Dalam Kontestasi Politik (Studi         Kasus Keterpilihan Kepala Desa Di Desa Batang).....</b>	<b>41</b>
1. Modal Ekonomi .....	45
2. Modal Budaya .....	48
3. Modal Sosial.....	50
4. Modal Simbolik.....	54
<b>BAB V.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemilu adalah sebuah acara demokrasi yang merayakan partisipasi rakyat, memungkinkan mereka untuk secara langsung memilih pemimpin dari tingkat pemerintahan pusat hingga tingkat lokal. Ini adalah medium di mana kedaulatan rakyat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, dapat diwujudkan, yaitu bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Contoh konkret dari proses pemilihan ini adalah Pilkades, di mana masyarakat langsung memilih kepala desa mereka, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Proses ini dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota, memberikan kesempatan kepada warga desa untuk secara langsung menentukan pemimpin mereka.

Sebelum Pilkades diselenggarakan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan memberi tahu Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah itu, BPD akan membentuk panitia Pilkades yang terdiri dari perangkat Desa, tokoh masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat independen dan tidak memihak (Syarifuddin dkk, 2019). Pemilihan Kepala Desa merupakan ajang kontes politik di mana setiap kandidat akan bersaing dengan dukungan yang berkaitan dengan ketokohnya, moralitasnya, popularitasnya, kinerjanya, serta latar belakang pendidikannya. Hal ini menjadi sangat signifikan dalam kontes tersebut (Qadri, 2018). Setiap calon Kepala Desa perlu mengembangkan strategi yang unik dan menarik untuk memenangkan

dukungan terbanyak dalam kontes ini (Muhazir, 2020). Menurut Pasal 31 dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat beberapa tahap yang harus dilalui oleh para calon Kepala Desa, yaitu (1) Pendaftaran sebagai calon (2) Seleksi administratif (3) Pengumuman calon Kepala Desa (4) Kampanye.

Perubahan dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan telah memberi desa kesempatan untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya secara lebih sesuai dengan karakteristiknya sendiri. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama di BAB 1 yang membahas ketentuan umum, Pasal 1 ayat 43, menggarisbawahi hal ini (Rudiadi & Herawati, 2017):

*“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*

Ini menegaskan pentingnya peraturan yang secara khusus mengatur desa serta pengakuan resmi desa oleh negara, yang menjadi dasar hukum yang signifikan. Oleh karena itu, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan produk dari perubahan tersebut. Kehadiran undang-undang desa ini mempunyai signifikansinya karena dua alasan pokok: Pertama, untuk menetapkan landasan

hukum yang spesifik dan terinci terkait tata kelola desa, mengingat sebelumnya, setelah era reformasi, regulasi terkait desa tergabung dalam undang-undang Pemerintahan Daerah. Kedua, melalui undang-undang desa ini, diharapkan tercipta langkah baru menuju penyempurnaan desa yang lebih demokratis, sejalan dengan semangat otonomi yang diamanatkan dalam konstitusi. Aspek yang menarik dan penting dalam undang-undang ini adalah ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa, yang dijelaskan dalam Pasal 31 (Rudiadi & Herawati, 2017).

1. Pemilihan Kepala Desa dilakukan serentak di seluruh kawasan Kabupaten/Kota.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menegaskan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serempak sesuai dengan aturan yang dijelaskan pada ayat sebelumnya, melalui Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Rincian mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara bersamaan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat sebelumnya diatur oleh Peraturan Pemerintah, seperti yang dikemukakan oleh Rudiadi & Herawati (2017).

Penjelasan regulasi tentang pemilihan Kepala Desa ini menunjukkan keseriusan untuk menerapkan demokratisasi di seluruh Indonesia dan juga semangat untuk meningkatkan otonomi daerah. Untuk memperkuat ketentuan yang tercantum dalam UU No.6 tentang Desa, diperlakukan pembuatan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.112 Tahun 2014 yang secara khusus

mengatur proses pemilihan Kepala Desa. Dalam Permendagri No.112 Tahun 2014 ini, terdapat beberapa aspek penting yang perlu dipahami, terutama di Bagian II yang menjelaskan proses pemilihan Kepala Desa, dan Bagian III yang menguraikan tahapan pelaksanaan pemilihan. Pasal 2 dan 3 di Bagian II tentang pemilihan Kepala Desa menjadi fokus utama (Rudiadi & Herawati, 2017).

1. Pasal 2 menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa dapat dilakukan secara bersamaan dalam satu tahap atau dalam beberapa tahap yang berurutan.
2. Pasal 3 menetapkan bahwa jika pemilihan Kepala Desa dilakukan dalam satu tahap sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 2, maka akan dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa di wilayah Kabupaten/Kota tersebut.

Dalam Permendagri No.112 Tahun 2014, Pasal 5 menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota, yang dipimpin oleh Bupati, bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Panitia Pemilihan di tingkat Kabupaten. Selain itu, dalam regulasi tersebut diuraikan pula tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap jalannya pemilihan Kepala Desa. Salah satu kewajiban BPD adalah membentuk Panitia Pemilihan di tingkat desa (Rudiadi & Herawati, 2017).

Proses persaingan politik dalam Pilkadaes tidak dapat dipisahkan dari keberadaan modalitas tertentu karena modalitas tersebut akan menjadi sumber energi dan kekuatan bagi kandidat untuk meraih kemenangan (Doe, dkk 2020). Ada tiga modal utama yang harus dimiliki oleh setiap kandidat dalam persaingan ini, yaitu modal ekonomi, modal politik, dan modal sosial (Irsat, 2020;

Febriansyah, dkk. 2021; Jupri, 2021). Selain ketiga modal tersebut, terdapat juga empat modalitas tambahan, yakni modal ekonomi, modal sosial, modal kultural, dan modal simbolik. Modal ekonomi berupa kekayaan atau aset yang dimiliki oleh kandidat yang akan memengaruhi persepsi masyarakat pemilih; modal sosial meliputi hubungan yang baik dengan pejabat politik dan jaringan yang kuat dengan tokoh-tokoh masyarakat; modal kultural mencakup pengetahuan tentang tata negara, penguasaan bahasa, prestasi akademik, dan kualifikasi pendidikan. Modal simbolik melibatkan penghormatan dan karisma yang melekat pada individu sejak lahir yang dapat memengaruhi orang lain (Wance&Djae, 2019).

Hubungan antara konsep Habitus (Siregar, 2022) dan ranah interaksi menghasilkan pemahaman bahwa ada aktivitas yang menyerupai pasar kompetitif yang mengembangkan gagasan tentang modal dalam strategi mereka. Dalam lingkup modal ekonomi, sosial, kultural, dan simbolik, kategori-kategori tersebut diidentifikasi sebagai berikut. Dalam ranah intelektual, individu memiliki modal yang khusus dan otoritas tertentu, seperti prestasi, untuk menunjukkan tindakan dan pengaruhnya. Teori habitus memberikan strategi dan perilaku yang sesuai dan beradaptasi dengan ranah intelektual dalam arena tersebut. "Pertarungan" sosial melibatkan modal dan habitus yang serupa, sehingga individu yang memiliki modal memiliki kemampuan untuk mempertahankan atau mengubah struktur sosial dibandingkan dengan yang tidak memiliki modal. Artinya, modal menjadi instrumen penting dalam mempertahankan kekuasaan politik. Penelitian ini menitikberatkan pada teori Habitus sebagai kerangka pikirnya (Siregar, 2022).

Pada tahun 2022, masyarakat Desa Batang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba mengalami periode kontestasi politik saat melakukan pemilihan Kepala Desa. Hasil rekapitulasi suara menunjukkan bahwa salah satu kandidat, yaitu Hamzah Hafid, berhasil terpilih sebagai Kepala Desa untuk periode 2022-2027. Kemenangan Hamzah Hafid sebagai petahana didukung oleh berbagai modalitas, termasuk modal ekonomi, sosial, kultural, dan simbolik. Ini berkaitan dengan interaksi sosial yang dibangunnya dengan masyarakat Desa Batang selama masa jabatan sebelumnya, di mana ia berhasil membangun reputasi yang baik dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga dapat terpilih kembali sebagai Kepala Desa. Modalitas tersebut, sesuai dengan teori Habitus yang dimiliki oleh Hamzah Hafid, menjadi topik menarik untuk diteliti dalam konteks kontestasi politik Pilkades.

### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana kemenangan Hamza Hafid sebagai Kepala Desa Batang.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kemenangan Hamzah Hafid sebagai Kepala Desa Batang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat secara teoretis dan praktis yaitu sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoretis**

Hasil penelitian ini memiliki nilai bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam pemahaman tentang teori modalitas dalam konteks kontestasi pemilihan Kepala Desa.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

#### A. Peneliti Terdahulu

Rencana penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain dan dijadikan sebagai referensi. Informasi mengenai penelitian sebelumnya disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

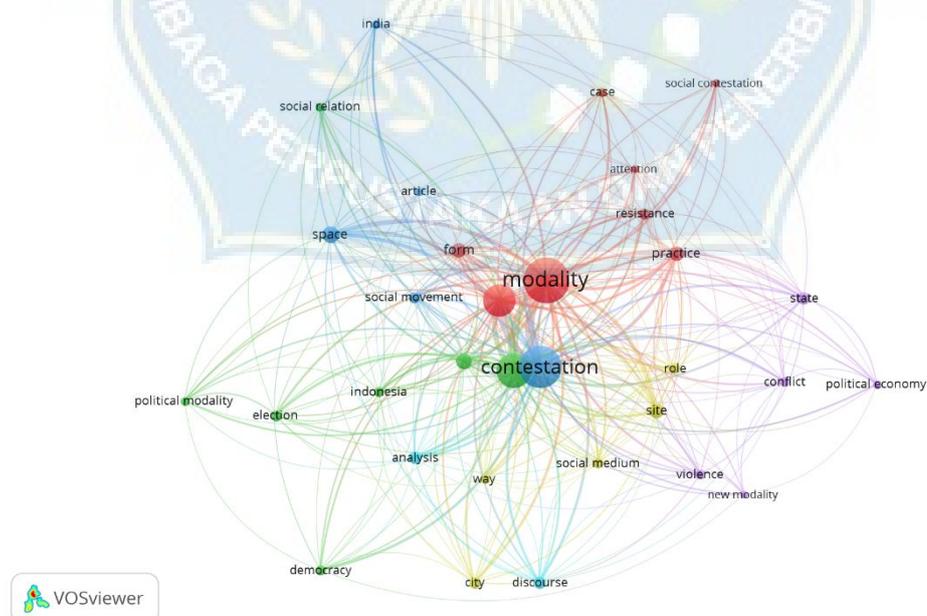
No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	(Doe dkk, 2020)	Pemanfaatan Modal Sosial Appi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar	Dalam penelitian oleh Doe, dkk, disimpulkan bahwa modal jaringan sosial Appi pada pemilihan walikota tahun 2020 lebih efektif dibandingkan dengan pemilihan walikota tahun 2018, dengan pengaruh yang signifikan terhadap tim sukses dan relawan eksternal. Appi menempatkan Erwin Aksa, Solihin Kalla, dan Sadikin Aksa dalam struktur tim sukses pemenang, yang menguatkan solidaritas tim.

2.	(Febriansyah dkk, 2021)	Optimalisasi Modal dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Desa : Studi Kasus	Penelitian oleh Febriansyah, dkk menemukan bahwa faktor utama yang berkontribusi pada kemenangan dalam pemilihan Kepala Desa adalah modalitas sosial. Ketika citra seorang kandidat di mata masyarakat Desa baik, maka masyarakat menjadi tertarik untuk memilihnya dalam kontestasi politik Pilkades.
3.	(Putra dkk, 2021)	Modal Sosial dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).(Studi terhadap Tokoh wandi sebagai calon Kepala Desa di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Jawa Barat Tahun 2019	Penelitian yang dilakukan oleh tim Putra, dkk menemukan bahwa modal sosial dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni materi dan non-materi. Dalam situasi ini, Wandu, seorang calon Kepala Desa, hanya memiliki modal non-materi, seperti keberanian, kerja keras, dan motivasi. Keterlibatan Wandu dalam Pilkades menciptakan sebuah paradigma baru bagi warga Desa Susukan, menunjukkan bahwa untuk mengajukan diri dalam Pilkades tidak selalu bergantung pada modal finansial, tetapi lebih kepada atribut seperti keberanian, kerja keras, motivasi, dan niat yang tulus. Ini bisa menjadi panduan moral bagi masyarakat agar tidak terjerumus dalam

			politik uang.
4.	(Ukhwaluddin & Subekti, 2022)	Politik Pencalonan Pasangan Suami Istri pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Sekaran Kabupaten Bojonegoro dan Desa Lembor Kabupaten Lamongan.	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ukhwaluddin & Subekti menunjukkan bahwa modal sosial dan modal simbolik di Desa Sekaran dipengaruhi dan didominasi oleh keluarga Bambang Harnowo, yang telah memimpin Desa Sekaran selama bertahun-tahun. Sementara di Desa Lembor, dipengaruhi oleh kekuatan kelompok masyarakat seperti NU dan Muhammadiyah yang aktif dalam Pilkades. Karena dominasi keluarga dan kekuatan kelompok NU dan Muhammadiyah, masyarakat Desa tidak berani untuk mencalonkan diri, dan kandidat yang maju adalah sepasang suami istri ini.
5	(Rizki dkk, 2022)	Kontestasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Cambai Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten OKI Sumatera Selatan	Penelitian yang dilakukan oleh tim Rizki dkk menemukan bahwa kemenangan Syaiful Mesa dalam kontestasi Pilkades di Desa Cambai didasarkan pada modal sosial yang dimilikinya selama menjabat sebagai Kepala Desa pada periode sebelumnya. Modal sosial ini menjadi bukti catatan kinerja yang menguntungkan

			dalam memenangkan kontestasi Pilkades tersebut.
6.	(Arbi dkk, 2023)	Modalitas Politik Incumbent di Pilkades (Studi terhadap Kemenangan Aminanto di Pilkades Sidoharjo-Bangka Selatan)	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Arbi dan rekannya, ditemukan bahwa kemenangan Aminanto dalam Pilkades Sidoharjo tahun 2021 didorong oleh modalitas sosialnya, yang tercermin dari totalitasnya yang sangat tinggi dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat Desa yang dipimpinnya pada periode sebelumnya.

Selain merujuk pada penelitian sebelumnya yang telah disebutkan, perbedaan dan kebaruan penelitian ini dapat dilihat melalui visualisasi yang dihasilkan oleh VOSviewer seperti yang ditunjukkan di bawah ini.



Gambar 2.1 Visualisasi Vosviewer

Berdasarkan analisis visualisasi data dari VOSviewer, ditemukan bahwa modalitas memegang peranan sentral dalam kontestasi politik. Selain itu, modalitas sosial, terutama modalitas sosial yang dimiliki oleh Hamzah Hafid, merupakan fokus penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kehadiran modalitas sosial ini menjadi subjek menarik untuk diteliti karena merupakan faktor kunci dalam pemilihan seorang pemimpin dalam pemilihan umum. Kebaruan penelitian ini didukung oleh referensi yang diperoleh melalui analisis menggunakan Publish or Perish.

Cites	Per year	Rank	Authors	Title	Year	Publication	Publisher	Type
18	6.00	18	Cl. Kelly	Party identification and political...	2020	book.google.com	Springer	BOOK
20	10.00	48	O. Lewis	The politics of prebureaucracy in...	2021	book.google.com	Springer	BOOK
7	2.83	40	G. H. H. H. H.	Malaysia and the politics of...	2020	researchgate.net	researchgate.net	BOOK
0	0.00	74	J. A. C. S. A.	Everyday Politics of Civic Educa...	2023	minneapolis.edu	minneapolis.edu	HTML
0	0.00	75	A. B. H.	Prebureaucracy and the politics...	2022	book.google.com	Springer	BOOK
14	4.67	84	B. S. S.	The politics of prebureaucracy...	2020	book.google.com	Springer	BOOK
17	25.00	87	F. A. S.	Banking and the politics of...	2020	book.google.com	Springer	BOOK
1	0.33	90	R. H. S.	Disruptive Innovation and the...	2020	scholar.google.com	scholar.google.com	PDF
40	10.00	93	A. K. S.	Cooperation and Conflict: Hegemo...	2019	book.google.com	Cambridge University Press	BOOK
20	10.00	101	P. K. S.	Kulturalisasi politik dan...	2021	book.google.com	Cambridge University Press	BOOK
7	7.00	103	S. G. S.	Politics and the state in...	2023	book.google.com	Cambridge University Press	BOOK
5	2.50	106	A. B. S.	Cultural reproduction in the Soc...	2021	researchgate.net	researchgate.net	PDF
14	7.00	116	D. P. S.	Continuous migrant solidarity: S...	2021	book.google.com	Cambridge University Press	BOOK
1	1.00	123	M. S.	The politics of social protection...	2022	book.google.com	Cambridge University Press	BOOK
16	5.33	129	P. R. S.	Capitalism, institutions and social...	2020	book.google.com	Cambridge University Press	BOOK
9	6.00	131	J. L. S.	Politics and Governance of Social...	2022	book.google.com	Cambridge University Press	BOOK

Gambar 2.2 Hasil penelusuran Metadata Melalui PoP

## B. Modalitas

Konsep Habitus (Siregar, 2022) dan arena (ranah) menyebabkan pemahaman bahwa terdapat aktivitas yang serupa dengan pasar kompetitif, yang menghasilkan ide modal dalam strategi. Modal dalam konteks ekonomi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk modal ekonomi, sosial, kultural, dan simbolik. Di ranah intelektual, memiliki modal yang khusus dan otoritas seperti prestasi membantu dalam menampilkan tindakan yang berpengaruh dan individu yang memiliki pengaruh. Kehadiran habitus memberikan strategi dan perilaku yang sesuai dengan ranah intelektual. Dalam "pertarungan" sosial, memiliki modal dan

habitus yang sama dengan mayoritas individu memungkinkan mereka untuk bertindak dalam mempertahankan atau mengubah struktur, berbeda dengan mereka yang tidak memiliki modal. Ini menunjukkan bahwa modal menjadi instrumen kunci dalam mempertahankan kekuasaan politik, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar pada tahun 2022.

### **1. Modalitas Ekonomi**

Modal ekonomi adalah sumber daya yang digunakan sebagai sarana produksi dan keuangan. Ini merupakan jenis modal yang dapat dengan mudah diubah menjadi bentuk modal lainnya. Modal ekonomi meliputi peralatan produksi (seperti mesin dan tanah), materi (seperti pendapatan dan barang), dan uang. Semua jenis modal ini diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Frimanzag mengkategorikan modal ekonomi yang tampak adalah uang yang digunakan untuk mendanai kampanye. Setiap partai atau politisi berupaya meyakinkan masyarakat dengan berbagai cara, memperlihatkan empati, dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Ini dilakukan melalui berbagai saluran promosi seperti televisi, lobi ke organisasi masyarakat, surat kabar, radio, spanduk, baliho, sewa konsultan politik, dan pengumpulan massa, yang semuanya membutuhkan dana yang besar. Modal ekonomi sesungguhnya mencerminkan tradisi Marxian dengan bentuk-bentuk modal yang didefinisikan dengan mengacu pada penguasaan ekonomi.

Pandangan Marxian tentang modal dianggap terlalu membatasi pemahaman tentang dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Modal

ekonomi adalah modal yang dapat secara langsung ditukar dan menjadi hak milik individu. Modal ekonomi, yang dapat langsung ditukar dan diberikan sebagai hak milik individu, relatif lebih independen dan fleksibel karena dapat digunakan dalam berbagai konteks lain dan diberikan atau diwariskan kepada orang lain.

## **2. Modal Kultural**

Modal budaya mencakup keseluruhan kualifikasi intelektual yang diperoleh melalui pendidikan formal dan warisan keluarga. Contohnya termasuk kemampuan untuk tampil di depan publik, pemilihan barang-barang budaya yang berharga, pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan, serta sertifikat (gelar akademik). Modal budaya, yang juga meliputi selera budaya dan pola konsumsi, dapat mencakup berbagai hal seperti seni, pendidikan, dan bahasa. Modal budaya berfungsi sebagai hubungan sosial yang terjadi dalam sistem pertukaran, di mana istilah ini mencakup segala bentuk barang, materi, atau simbol, tanpa memandang perbedaan, yang dianggap langka dan bernilai untuk dicari dalam suatu formasi sosial tertentu.

## **3. Modal Sosial**

Modal sosial merujuk pada jenis hubungan sumber daya yang mempengaruhi posisi sosial seseorang. Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa modal sosial adalah hubungan sosial yang memiliki nilai antara individu. Sebagai contoh, bagian dari masyarakat yang berinteraksi di antara kelas-kelas dalam struktur sosial masyarakat. Modal sosial cenderung menghindari pembiasan pada tiga aspek kunci. Pertama, melibatkan

institusi-institusi, norma, nilai-nilai, konvensi kehidupan, kode-kode perilaku, dan sejenisnya. Kedua, pola pengelolaannya berkontribusi pada pembentukan kepaduan sosial. Ketiga, signifikansi dari modal sosial tertentu melibatkan proses negosiasi dan adaptasi, yang mendorong individu lain untuk melakukan tindakan reinterpratatif terhadap modal yang dimiliki.

Modal sosial dapat diukur melalui tiga metode. Pertama, melalui dukungan kelompok kolektif, di mana jumlah dukungan yang diterima oleh kandidat lain diukur. Pengukuran ini mencakup dukungan individu terhadap dukungan kolektif yang mewakili individu tersebut. Kedua, melalui ikatan personal dengan kelompok-kelompok kandidat yang berpartisipasi langsung di luar partai politik, seperti kelompok masyarakat lokal. Ketiga, modal sosial dapat diukur melalui pengakuan nama calon dalam asosiasinya. Modal sosial memiliki makna yang luas dan kompleks, mencakup berbagai faktor yang dimiliki oleh seseorang, seperti keluarga, organisasi, dan semua hal yang dapat menghasilkan kerjasama. Modal sosial ini menekankan potensi kelompok dan pola hubungan antar individu dalam kelompok tersebut dan antara kelompok, dengan fokus pada elemen seperti kepercayaan, norma sosial, dan nilai-nilai yang muncul dari anggota kelompok dan menjadi norma di dalamnya.

#### **4. Modal Simbolik**

Modal simbolik merupakan jenis sumber daya yang dimanfaatkan untuk memperoleh kekuasaan simbolik, seringkali melibatkan simbol-simbol kekuasaan seperti jabatan, kendaraan mewah, kantor prestisius, status tinggi, dan keturunan terhormat. Ini berarti bahwa modal simbolik

dimaksudkan sebagai bentuk pengakuan oleh kelompok, baik secara institusional maupun non-institusional. Modal simbolik memiliki kekuatan untuk membentuk realitas, mengarahkan individu untuk mempercayai, mengakui, dan mengubah persepsi tentang realitas seseorang, sekelompok orang, partai politik, atau bangsa. Proses kekuasaan simbolik terjadi saat otonomi ranah melemah, sehingga muncul agen di ranah untuk menantang atau menggantikan doktrin yang ada. Menurut Pierre Bourdieu dalam konsep Heterodoksa dan Ortodoksa, "tantangan" adalah ketika persepsi dan apresiasi yang sedang berlaku secara eksplisit dipertanyakan mengenai keabsahan atau ketidakabsahan mereka, sedangkan situasi "ortodoksa" merujuk pada doktrin yang dikenali dan diterima dalam praktik. Kelompok dominan yang memiliki kekuasaan berusaha untuk mengakumulasi modal simbolik melalui prestise, kehormatan, pengetahuan, dan pengakuan.

Modal simbolik merupakan bagian integral dari kekuasaan simbolik yang memungkinkan individu memperoleh apa yang mereka dapatkan melalui kekuasaan fisik dan ekonomi. Contohnya, memiliki kantor yang luas, mobil dengan sopir, status tinggi, atau gelar pendidikan yang dicantumkan di kartu nama dapat memberikan seseorang otoritas dalam menyambut tamu atau menunjukkan posisinya. Modal simbolik memiliki kekuatan di dalam suatu ranah tertentu, yang memiliki kebutuhan modal yang berbeda dengan ranah lainnya. Kekuatan modal ekonomi seseorang dalam ranah kekuasaan dapat memberikan keunggulan yang signifikan. Ranah bahasa membutuhkan legitimasi yang diberikan oleh modal kultural dan modal simbolik.

### **C. Kontestasi Politik Pemilihan Kepala Desa**

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah sebuah entitas masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang diberi wewenang untuk mengelola urusan pemerintahan dan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan Kepala Desa merupakan bagian integral dari proses demokrasi yang aktif dilakukan di tingkat desa dan merupakan arena di mana para calon kandidat bersaing secara politik. Pemilihan Kepala Desa adalah manifestasi konkret dari prinsip demokrasi, sebagaimana dijelaskan oleh Ciptono & Pujileksono (2021), karena dalam proses pilkades terdapat keterlibatan aktif masyarakat dan pilihan bebas dalam menentukan pilihannya, sesuai dengan temuan Ramadani dan rekan-rekannya pada tahun 2018 (Ramadani, dkk. 2018). Pemilihan Kepala Desa adalah bagian dari kewenangan otonomi desa dalam mengelola dan mengurus urusan politik lokal bagi penduduk desa, dengan fokus utama pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sebagaimana disampaikan oleh Arbi dan timnya pada tahun 2023. (Arbi, dkk. 2023).

Kepala Desa dipilih oleh penduduk Desa yang merupakan warga Negara Republik Indonesia, dengan masa jabatan enam tahun yang hanya dapat dipilih kembali sekali pada periode berikutnya, sesuai dengan penelitian oleh Sholikin pada tahun 2020. Proses pemilihan Kepala Desa terdiri dari empat tahap, yakni Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara, dan Penetapan Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 112 Tahun 2014, seperti yang ditegaskan oleh Putra & Hanafie pada tahun 2021. Praktik pemilihan Kepala Desa

merupakan salah satu implementasi demokrasi langsung di lingkungan pedesaan, yang menekankan pentingnya kompetisi antara kandidat, partisipasi, dan kebebasan, sebagaimana disampaikan oleh Muhazir pada tahun 2020. Tujuan dari proses ini adalah untuk mencari sosok pemimpin terbaik yang akan mengarahkan pembangunan desa. Meskipun memiliki prinsip yang sama dengan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yaitu prinsip LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia), Pemilihan Kepala Desa tidak melibatkan partai politik, sesuai dengan penelitian oleh Upe dan rekan-rekannya pada tahun 2022. Modalitas utama yang harus dimiliki oleh para kandidat adalah modalitas ekonomi, sosial, dan politik. Kandidat yang memiliki modalitas yang paling kuat di mata masyarakat akan menjadi pemenang dalam Pilkades ini.

#### **D. Kerangka Pikir**

Pertarungan politik dalam pemilihan Kepala Desa sangat tergantung pada modalitas, karena hal ini menentukan bagaimana para kandidat akan bersaing untuk memenangkan posisi kepemimpinan. Para kandidat perlu membangun beberapa modalitas, termasuk modal ekonomi, modal sosial, modal kultural, dan modal simbolik. Dari keempat modalitas tersebut, modalitas sosial menjadi faktor yang paling signifikan dalam memperoleh dukungan dari masyarakat Desa. Tahun 2022 menjadi tahun penting dalam kontestasi politik bagi masyarakat Desa Batang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, di mana mereka menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa. Hasil rekapitulasi suara menunjukkan bahwa salah satu kandidat, yaitu Hamzah Hafid, terpilih sebagai Kepala Desa untuk periode 2022-2027.

Konsep Habitus dan ranah menghasilkan pandangan bahwa aktivitas yang serupa dengan pasar kompetitif menciptakan konsep modal dalam strategi. Modal dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk modal ekonomi, sosial, kultural, dan simbolik. Dalam konteks intelektual, memiliki modal yang spesifik dan otoritatif seperti prestasi memberikan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang berpengaruh. Habitus memungkinkan individu untuk menyesuaikan diri dengan ranah intelektual. Dalam pertarungan sosial, individu dengan modal dan habitus yang sama memiliki kemampuan untuk mempertahankan atau mengubah struktur sosial. Dengan demikian, modal menjadi instrumen penting dalam menjaga kekuasaan politik (Siregar, 2022).

### **1. Modalitas Ekonomi**

Modal ekonomi merupakan sumber daya yang digunakan sebagai alat produksi dan keuangan. Jenis modal ini dapat dengan mudah diubah menjadi bentuk modal lainnya. Modal ekonomi mencakup peralatan produksi seperti mesin dan tanah, sumber daya material seperti pendapatan dan barang-barang, serta uang. Semua jenis modal ini cenderung diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam konteks politik, modal ekonomi sering kali terlihat dalam bentuk uang yang digunakan untuk mendanai kampanye. Setiap partai atau politisi berupaya meyakinkan publik dengan memperlihatkan perhatian, empati, pemahaman akan masalah bangsa, dan dukungan terhadap aspirasi rakyat. Penggunaan modal ekonomi dalam kampanye mencakup berbagai media promosi seperti televisi, lobi di organisasi massa, koran, radio, spanduk, serta sewa konsultan politik dan mobilisasi massa, yang semuanya membutuhkan investasi finansial yang

besar. Secara filosofis, modal ekonomi mengikuti tradisi Marxian dengan bentuknya yang didefinisikan melalui kontrol atas sumber daya ekonomi.

Pendapat bahwa konsep modal dalam pandangan Marxian dianggap terlalu terbatas dalam memahami dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Modal ekonomi adalah jenis modal yang dapat dengan langsung ditukarkan dan memiliki hak kepemilikan individu yang dapat dipatenkan. Modal ekonomi memiliki karakteristik sebagai sumber daya yang relatif independen dan fleksibel karena dapat digunakan dalam berbagai ranah lainnya serta dapat diserahkan atau diwariskan kepada individu lain.

## **2. Modal Kultural**

Modal Budaya mencakup segala aspek intelektual yang dapat dihasilkan melalui pendidikan formal atau diwariskan melalui keluarga. Contohnya, kemampuan untuk tampil di depan publik, pemilihan benda-benda budaya yang memiliki nilai tinggi, pengetahuan dan keahlian tertentu yang diperoleh melalui pendidikan, serta sertifikat atau gelar akademik. Modal budaya ini mencakup preferensi terhadap nilai-nilai budaya dan pola konsumsi yang dapat mencakup berbagai bentuk properti seperti seni, pendidikan, dan bahasa. Sebagai bagian dari sistem pertukaran sosial, Modal Budaya berperan dalam interaksi sosial di mana segala jenis barang, materi, atau simbol memiliki nilai yang diakui dan dicari dalam struktur sosial tertentu.

### 3. Modal Sosial

Modal sosial merujuk pada jenis hubungan sumber daya yang mempengaruhi posisi sosial seseorang. Menurut Pierre Bourdieu, modal sosial adalah hubungan sosial yang memiliki nilai antar individu. Sebagai contoh, sebagian masyarakat berinteraksi dalam berbagai lapisan sosial, seperti antar kelas dalam masyarakat. Modal sosial cenderung menghindari kebiasaan pada tiga aspek kunci. Pertama, modal sosial terkait dengan institusi, norma, nilai, konvensi hidup, kode perilaku, dan elemen serupa lainnya. Kedua, pola interaksi sosial ini berperan dalam menciptakan kesatuan sosial. Ketiga, makna dari modal sosial tertentu melibatkan proses negosiasi dan adaptasi, sehingga mendorong individu lain untuk melakukan interpretasi ulang terhadap modal yang dimilikinya.

Pengukuran modal sosial dilakukan melalui tiga metode. Pertama, melalui dukungan yang diterima oleh kelompok kolektif calon, dihitung dengan jumlah dukungan dari kandidat lain yang diterima oleh calon tertentu. Pengukuran ini mencakup dukungan individu pada dukungan kolektif, yang mewakili preferensi individu. Kedua, melalui ikatan personal antara calon dan kelompok kandidat yang langsung terlibat di luar partai politik, seperti kelompok sipil lokal. Ketiga, modal sosial tercermin dalam pengakuan nama calon dalam asosiasi tertentu. Modal sosial memiliki cakupan yang luas dan kompleks, yang bisa diinterpretasikan melalui berbagai faktor yang dimiliki individu. Contohnya termasuk kelompok institusi keluarga, organisasi, dan segala hal yang mendukung kerja sama. Modal sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan pola hubungan

antar individu dalam atau antar kelompok, dengan memperhatikan aspek-aspek seperti kepercayaan, norma yang dipegang bersama, dan nilai-nilai yang menjadi bagian dari norma kelompok.

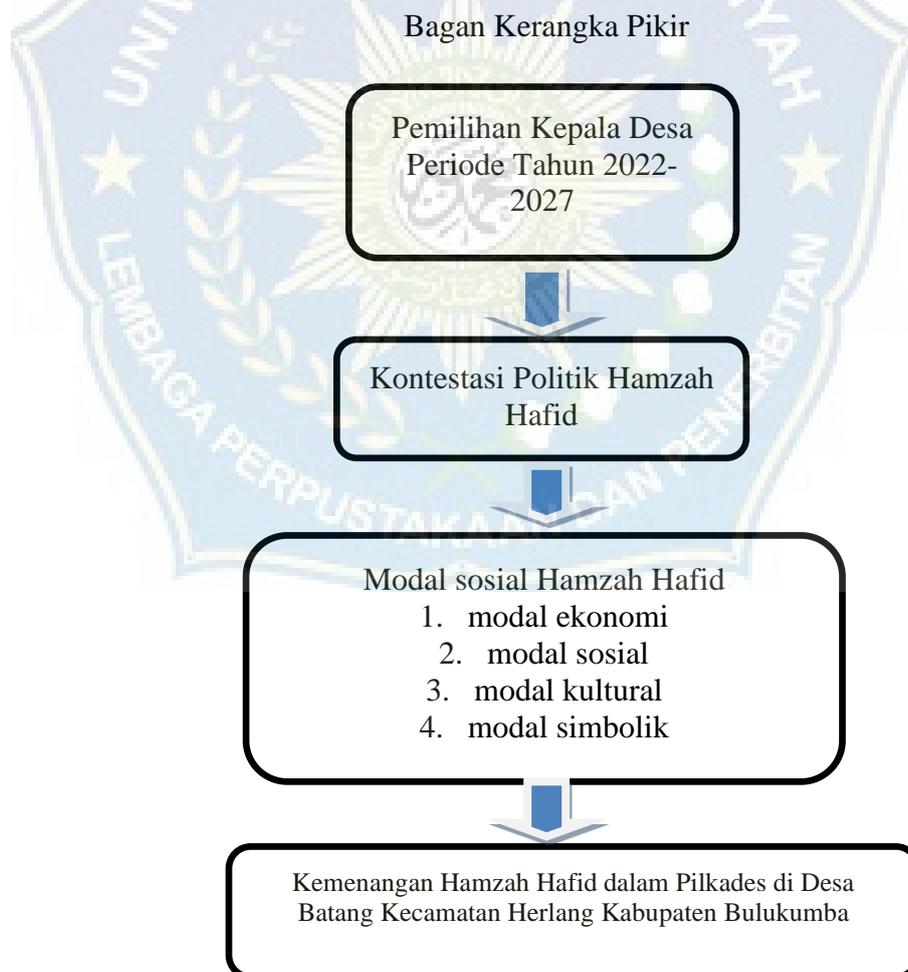
#### **4. Modal Simbolik**

Modal simbolik merupakan jenis sumber daya yang dimanfaatkan untuk memperoleh kekuasaan simbolik, sering kali melibatkan simbol-simbol kekuasaan seperti jabatan, mobil mewah, kantor prestisius, status tinggi, dan nama keluarga yang terhormat. Modal simbolik ini merupakan bentuk pengakuan dari kelompok, baik secara institusional maupun non-institusional. Kekuatan modal simbolik ini terletak pada kemampuannya untuk membentuk realitas, menggiring orang untuk mempercayai, mengakui, dan mengubah pandangan mengenai realitas individu, kelompok, partai politik, atau bangsa. Proses kekuasaan simbolik terjadi ketika otonomi ranah lemah, yang memunculkan agen dalam ranah tersebut untuk menantang atau menggantikan dominasi. Konsep Heterodoksa dan Ortodoksa oleh Pierre Bourdieu mengilustrasikan bahwa situasi yang menantang secara eksplisit mempertanyakan keabsahan persepsi dan apresiasi yang berlaku saat itu, sementara situasi yang ortodoks diakui dan diterima dalam praktik. Kelompok yang memiliki dominasi berusaha untuk mengakumulasi prestise, kehormatan, pengetahuan, dan pengakuan sebagai bentuk modal simbolik.

Modal simbolik merupakan bagian integral dari kekuasaan simbolik, yang merupakan hasil dari penguasaan terhadap kekuasaan fisik dan ekonomi. Contohnya adalah memiliki kantor yang luas, mobil dengan supir,

status yang tinggi, serta gelar pendidikan yang tercantum di kartu, semuanya adalah cara untuk menegaskan otoritas seseorang dalam masyarakat. Modal simbolik memiliki kekuatan yang berbeda dalam kebutuhan modal dibandingkan dengan ranah lainnya. Kekuatan modal ekonomi seseorang dalam ranah kekuasaan mampu secara efektif bertahan dalam pertarungan. Ranah bahasa menjadi penting dalam memberikan legitimasi pada modal kultural dan modal simbolik.

Dari penjelasan tersebut, kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat dalam ilustrasi yang diperlihatkan dalam Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Alur Kerangka Pikir

### **E. Fokus Penelitian**

Fokus dalam rencana penelitian ini adalah untuk mengkaji modalitas sosial Hamzah Hafid, yang merupakan Kepala Desa terpilih untuk periode 2022-2027. Penelitian akan memusatkan perhatian pada elemen-elemen modal ekonomi, modal sosial, modal kultural, dan modal simbolik.

### **F. Deskripsi Fokus Penelitian**

Deskripsi fokus penelitian tidak terlepas dari masalah utama yang dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Modal Ekonomi**

Modal ekonomi merupakan sumber daya yang digunakan sebagai alat produksi dan keuangan. Ini merupakan jenis modal yang dapat dengan mudah diubah menjadi berbagai bentuk modal lainnya. Modal ekonomi melibatkan berbagai elemen, termasuk alat produksi seperti mesin dan tanah, aset materi seperti pendapatan dan barang-barang, serta uang. Semua bentuk modal ini diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Frimanzag, dalam kategorisasinya, mengidentifikasi uang sebagai salah satu bentuk modal ekonomi yang terlihat, terutama digunakan untuk membiayai kampanye politik. Dalam konteks kontestasi pemilihan desa, semua calon yang berpartisipasi dalam proses demokrasi ini memerlukan kampanye yang memadai, yang juga memerlukan biaya yang signifikan. Oleh karena itu, modal ekonomi memainkan peran penting dalam pemilihan kepala desa, seperti yang terlihat dalam pemilihan kembali Hamza Hafid untuk periode kedua.

## 2. Modal Sosial

Selama menjabat sebagai Kepala Desa pada periode sebelumnya, Hamzah Hafid, yang merupakan bagian dari "elit lama" atau incumbent, telah membangun reputasi yang kuat di kalangan masyarakat Desa yang dipimpinnya. Hal ini disebabkan oleh kepopuleran dan rasa pedulinya yang tinggi terhadap masyarakat, yang menjadikan figur Hamzah Hafid sangat dikenal dan dihormati. Karena reputasi sosialnya yang baik, masyarakat memberikan kepercayaan kepada Hamzah Hafid untuk kembali memimpin.

## 3. Modal Kultural

Modal Budaya merujuk pada semua kualifikasi intelektual yang dapat dihasilkan melalui pendidikan formal atau warisan keluarga. Contohnya adalah kemampuan dalam berbicara di depan publik. Hal yang tak terbantahkan adalah bahwa Hamza Hafid adalah petahana yang telah terbukti figuranya, dan citra yang dibangunnya dari awal terlihat dari kemenangannya pada periode kedua.

## 4. Modal Simbolik

Ini mengindikasikan bahwa modal simbolik berfungsi sebagai bentuk pengakuan oleh sekelompok, baik secara lembaga maupun tidak resmi. Modal ini memiliki kekuatan dalam membentuk realitas, mampu memengaruhi orang untuk percaya, mengakui, dan mengubah persepsi tentang realitas individu, kelompok, partai politik, atau bangsa. Dalam konteks ini, tidak dapat dipertanyakan lagi bahwa Hamza Hafid telah mencapai hal tersebut, seperti yang dijelaskan sebelumnya, terbukti dari

kepemimpinannya pada periode sebelumnya yang menjadi bukti nyata dari realitas kepemimpinan tersebut, dan dari hasil kerja kerasnya selama periode pertama, dia terpilih kembali pada periode kedua.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Rencana penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Batang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, dengan periode penelitian yang direncanakan berlangsung mulai bulan April hingga Mei 2022.

##### B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif yang menggunakan metode pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan memahami modalitas sosial Hamzah Hafid sebagai pemenang kontestasi politik dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Batang. Metode yang digunakan adalah tipe studi kasus.

##### C. Informan

Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari keluarga inti Hamzah Hafid, tokoh-tokoh masyarakat, dan perangkat Desa. Pemilihan partisipan ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang paling relevan mengenai modalitas sosial Hamzah Hafid, termasuk modal ekonomi, sosial, kultural, dan simbolik sebagai Kepala Desa terpilih. Berikut adalah daftar partisipan:

No	Jabatan	Nama Informan
1	Kepala Desa Batang	Hamza Hafid
2	Sekretaris Desa Batang	Alimuddin
3	Tokoh Pemuda Desa Batang	Muh Ikhsan, S.Sos

4	Masyarakat Desa Batang	Omang
---	------------------------	-------

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup beberapa metode, seperti observasi langsung di lapangan, wawancara dengan informan terpilih, dan studi dokumentasi. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan:

##### 1) Observasi

Dilakukan observasi terhadap modalitas sosial, modalitas ekonomi, modalitas kultural, dan modalitas simbolik yang dimiliki oleh Hamzah Hafid selaku Kepala Desa yang terpilih.

##### 2) Wawancara

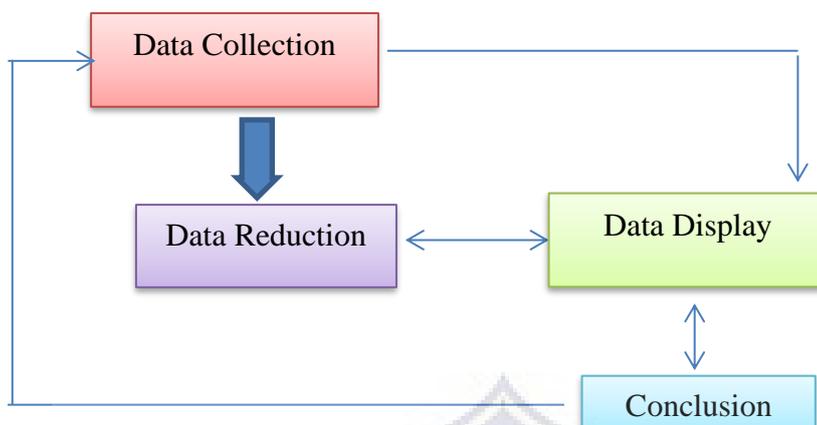
Wawancara dilaksanakan dengan anggota keluarga inti Hamzah Hafid, tokoh masyarakat, dan perangkat Desa.

##### 3) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilaksanakan dengan mengumpulkan dan membandingkan berbagai literatur yang mencakup jurnal, buku, serta dokumentasi penelitian lainnya selama proses penelitian.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini mengadopsi model Miles and Huberman 1992 (Sugiyono, 2016). Proses pengumpulan dan analisis data ini dapat diilustrasikan melalui Gambar 3.1.



Gambar .3.1. Teknik Analisis Data Model Miles & Huberman

Teknik analisis data model Miles & Huberman dijabarkan sebagai berikut:

1. *Data collection* (Pengumpulan data)

Data mengenai modalitas sosial yang terkumpul dari observasi, wawancara, dan dokumentasi selama penelitian lapangan akan digabungkan secara bertahap untuk kemudian direduksi.

2. *Data reduction* (Reduksi data)

Data yang diperoleh dari observasi di lapangan, wawancara dengan keluarga inti Hamzah Hafid, tokoh masyarakat, dan perangkat Desa, serta dokumentasi seperti foto, video, buku, dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini, dikumpulkan dan kemudian direduksi. Proses reduksi dilakukan dengan melakukan seleksi dan penyortiran data yang dianggap valid.

3. *Display data* (Penyajian data)

Data yang telah direduksi kemudian dipresentasikan dalam bentuk uraian singkat dan ditarik kesimpulan sementara. Proses reduksi data dan

tampilan data saling terkait dan bekerja sama dalam proses penarikan kesimpulan awal.

#### 4. *Conclusion/verification* (Kesimpulan/verifikasi)

Kesimpulan diambil berdasarkan data yang telah melalui proses reduksi dan tampilan data yang mengandung data observasi, wawancara, dan dokumentasi yang terverifikasi atau dapat dipercaya.

### F. Teknik Keabsahan Data

Teknik Keabsahan data dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Standar kredibilitas

Menurut Fatchan (2009), Lincoln dan Guba menjelaskan bahwa kredibilitas dapat diukur dengan:

##### a. Triangulasi data

Triangulasi data dilaksanakan untuk mengaitkan data observasi modalitas sosial dengan hasil wawancara bersama keluarga inti Hamzah Hafid, tokoh masyarakat, dan perangkat Desa, serta dengan data dokumentasi.

##### b. *Member Check*

Member check dilakukan dengan melakukan pengecekan silang terhadap data yang diperoleh dari observasi dan wawancara, memastikan keakuratan data tersebut dengan mengonfirmasinya kembali kepada informan yang terlibat.

##### c. Melakukan audit trail

Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara kemudian ditranskripsikan dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan hasil dari

audit trail, yang didapat dari member check, dan kemudian dimasukkan ke dalam hasil penelitian dan pembahasan.

## **2. Standar transferabilitas**

Transferabilitas penelitian ini dianggap valid jika hasilnya dapat diterapkan atau diuji ulang dalam konteks atau wilayah lain, sehingga menjadi standar transferabilitas yang sesuai.

## **3. Standar dependabilitas**

Dependabilitas penelitian ini dianggap valid dan dapat dipercaya jika hasil observasi dan wawancara menunjukkan konsistensi yang baik.

## **4. Standar konfirmasi**

Konfirmasi penelitian ini mengacu pada verifikasi informasi yang diperoleh dari lapangan dan sejalan dengan hasil observasi dan wawancara. Hasil penelitian kemudian disampaikan kepada dosen pembimbing.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

Dalam bab ini, peneliti akan menguraikan secara menyeluruh mengenai lokasi penelitian dan topik terkait “Modalitas Sosial Hamzah Hafid Dalam Kontestasi Politik (Studi Kasus Keterpilihan Kepala Desa Di Desa Batang)” di Kabupaten Bulukumba. Penggambaran umum mengenai kota Bulukumba meliputi luas wilayah dan populasi penduduknya.

##### **1. Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba**

Asal-usul penamaan "Bulukumba" berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Bugis, yakni "Bulu'ku" dan "Mupa", yang secara harfiah berarti "tetap gunung milik saya" dalam bahasa Indonesia. Mitos ini berasal dari zaman ke-17 Masehi ketika terjadi konflik antara dua kerajaan Sulawesi yang besar, yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. Di sepanjang pesisir pantai yang disebut "Tana Kongkong", utusan dari Raja Gowa dan Raja Bone bertemu untuk bernegosiasi secara damai dan menetapkan batas wilayah masing-masing kerajaan. Bangkeng Buki' (yang artinya secara harfiah adalah "kaki bukit") adalah serangkaian lereng bukit dari Gunung Lompo Battang yang dinyatakan oleh Kerajaan Gowa sebagai batas wilayah mereka dari Kindang ke arah timur. Namun, Kerajaan Bone bersikeras mempertahankan Bangkeng Buki' sebagai bagian dari wilayah kekuasaannya, mulai dari barat hingga selatan. Peristiwa tersebut memunculkan kalimat dalam bahasa Bugis "Bulu'ku mupa", yang

kemudian mengalami perubahan dalam proses bunyi menjadi "Bulukumba" dalam dialek tertentu. Sejak saat itu, nama Bulukumba mulai dikenal dan menjadi sebuah Kabupaten yang resmi. Proses pengesahan Bulukumba sebagai nama kabupaten dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, yang kemudian diikuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 1978, tentang Lambang Daerah.

Pada tanggal 28 Maret 1994, diadakan seminar sehari dengan pembicara Prof. Dr. H. Ahmad Mattulada, seorang pakar sejarah dan budaya, yang menetapkan hari pendirian Kabupaten Bulukumba pada tanggal 4 Februari 1960 melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994. Secara resmi, Kabupaten Bulukumba diakui sebagai wilayah tingkat II setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba menyetujui Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba pada tanggal 4 Februari 1960. Selanjutnya, dilaksanakan pelantikan Bupati pertama, yaitu Andi Patarai, pada tanggal 12 Februari 1960. Terletak di bagian selatan Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba berjarak 153 km dari Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bulukumba memiliki luas wilayah sebesar 1.154,7 km<sup>2</sup>, yang setara dengan 2,5 % dari total luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini terbagi menjadi 10 kecamatan, termasuk di antaranya Kecamatan Ujung Bulu yang berfungsi sebagai Ibukota Kabupaten.

Kecamatan lainnya adalah Gantarang, Kindang, Rilau Ale, Bulukumpa, Ujung Loe, Bonto Bahari, Bonto Tiro, Kajang, dan Herlang. Tiga dari kecamatan tersebut menjadi pusat pengembangan pertanian dan perkebunan, yaitu Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale, dan Kecamatan Bulukumpa. Sementara itu, dua kecamatan lainnya merupakan pusat pariwisata, yakni Kecamatan Bonto Bahari dan Kecamatan Bonto Tiro. Kabupaten Bulukumba secara geografis terletak di antara koordinat  $5^{\circ}20'$  sampai  $5^{\circ}40'$  lintang selatan dan  $119^{\circ}50'$  sampai  $120^{\circ}28'$  bujur timur. Wilayah kabupaten ini berbatasan:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Sinjai
- b. Sebelah Selatan : Laut lores
- c. Sebelah Timur : Teluk Bone
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Bantaeng

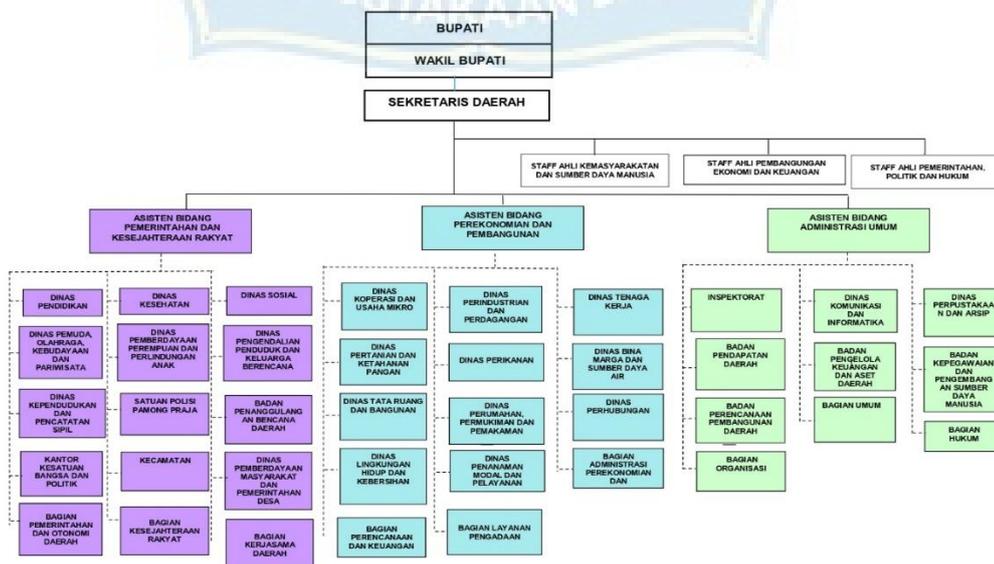
Di Kabupaten Bulukumba, terdapat area perbukitan yang membentang dari Barat ke Utara, dengan ketinggian antara 100 hingga lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini meliputi sebagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa, dan Kecamatan Rilau Ale. Suhu rata-rata di Kabupaten Bulukumba berkisar antara  $23,82^{\circ}\text{C}$  hingga  $27,68^{\circ}\text{C}$ , yang sangat mendukung pertanian tanaman pangan dan perkebunan. Berdasarkan analisis Smith-Ferguson, iklim di Kabupaten Bulukumba dapat dikategorikan sebagai iklim lembab atau agak basah, yang ditentukan oleh pola curah hujan selama bulan basah dan bulan kering.

Topografi di Kabupaten Bulukumba sangat beragam, mulai dari dataran rendah hingga ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut, yang dapat dibagi menjadi tiga satuan morfologi. Dataran rendah, dengan ketinggian antara 0 hingga 25 meter di atas permukaan laut, mencakup kecamatan Gantarang, Ujung Bulu, Ujung Loe, Bonto Bahari, Bonto Tiro, Kajang, dan Herlang, yang merupakan wilayah pesisir. Wilayah bergelombang, dengan ketinggian antara 25 hingga 100 meter di atas permukaan laut, meliputi kecamatan Gantarang, Kindang, Bontobahari, Bontotiro, Kajang, Herlang, Bulukumpa, dan Rilau Ale. Sedangkan wilayah perbukitan, dengan ketinggian antara 100 hingga lebih dari 500 meter di atas permukaan laut, terbentang dari Barat ke Utara, meliputi Kecamatan Kindang, Bulukumpa, dan Rilau Ale.

Struktur organisasi pemerintah Kota Bulukumba di dalam kantor Bupati Kota Bulukumba adalah sebagai berikut:

### Pembentukan dan Susunan Daerah Kabupaten Bulukumba

Gambar



## 2. Gambaran Khusus lokasi Penelitian

Desa Batang terletak di tengah-tengah wilayah kecamatan Bontotiro, yang geografisnya berbukit-bukit dan merupakan salah satu jalur utama menuju tempat wisata di sebelah timur Kabupaten Bulukumba. Mayoritas wilayahnya adalah ladang jagung, sementara sebagian lainnya terdiri dari hutan kayu dan sawah. Tanah di Desa Batang terdiri dari tanah merah gersang yang sebagian besar diubah menjadi ladang jagung, serta tanah hitam liat yang hanya dijadikan beberapa petak sawah. Curah hujan cenderung rendah selama musim kemarau, sedangkan intensitasnya sedang selama musim penghujan, namun wilayah ini memiliki potensi terdampak angin kencang karena letaknya yang berada di dataran tinggi dan dekat dengan pantai di sebelah timur. Berikut adalah daerah perbatasan Desa Batang:

- a utara: Dusun Lembang dengan Desa Bontobulaeng.
- b Selatan: Dusun Bontomonro dan Dusun Kampangang dengan Desa Tamalanrea.
- c Barat: Dusun Bontomonro dengan Desa Bontotanga.
- d Timur: Dusun Possi Tanah dengan Desa Buhung Bundang.

Pusat pemerintahan dan administrasi Desa Batang sekarang terletak di Dusun Mattoanging. Kepala Desa Batang saat ini adalah Hamzah Hafid, yang menggantikan Alm. H. Jamaluddin setelah terpilih melalui Pemilu Kepala Desa tahun 2016. Desa Batang terbagi menjadi lima Dusun, di mana setiap Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang dibantu oleh ketua

RT/RW. Berikut adalah daftar Dusun yang ada di Desa Batang: Dusun Mattoanging memiliki dua RT/RW, Dusun Bontomonro memiliki dua RT/RW, Dusun Lembang memiliki dua RT/RW, Dusun Kampangang memiliki dua RT/RW, dan Dusun Possi Tanah memiliki dua RT/RW.

#### **Berikut Peroleha Suara Dari Masa Ke masa**

<b>No.</b>	<b>Nama Pejabat</b>	<b>Mulai menjabat</b>	<b>Akhir menjabat</b>	<b>Masa jabatan</b>
1.	<u>Andi Mappanganro</u>	1960	1972	12 tahun
2.	<u>Andi Mahoraja</u>	1972	1974	2 tahun
3.	<u>Andi Rajagau Basri</u>	1974	1986	12 tahun
4.	<u>Andi Muh. Syafri</u>	1986	1998	12 tahun
5.	<u>Abdul Wahid Daming</u>	1998	2010	12 tahun
6.	<u>H.Jamaluddin</u>	2010	2016	6 tahun
7.	<u>Hamzah Hafid</u>	2016	<i>sekarang</i>	<i>petahana</i>

### **3. Gambaran Khusus Modalitas Sosial Hamzah Hafid Dalam Kontestasi Politik (Studi Kasus Keterpilihan Kepala Desa Di Desa Batang**

Pemilihan umum merupakan momen penting dalam demokrasi di mana rakyat memiliki hak penuh untuk memilih pemimpin mereka, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Melalui pemilu, rakyat dapat berpartisipasi aktif dalam menentukan arah kepemimpinan negara mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

Salah satu contoh pemilihan umum dalam skala yang lebih kecil adalah pemilihan Kepala Desa, yang biasa disebut Pilkades, di mana masyarakat Desa secara langsung memilih pemimpin mereka. Pemilihan Kepala Desa diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang

menetapkan bahwa pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

Sebelum Pilkades diselenggarakan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa sebelum masa jabatannya berakhir, dengan pemberitahuan tersebut diberikan enam bulan sebelum masa jabatannya habis. Selanjutnya, BPD akan membentuk panitia Pilkades yang terdiri dari perangkat Desa, tokoh masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat mandiri dan netral (Syarifuddin dkk, 2019).

Pemilihan Kepala Desa merupakan arena persaingan politik di mana setiap kandidat akan bersaing dengan mendapat dukungan atas ketokohnya, moralitasnya, popularitasnya, kinerjanya, dan latar belakang pendidikannya. Persaingan ini menjadi krusial dalam konteks Pilkades (Qadri, 2018). Setiap calon Kepala Desa perlu merancang strategi yang unik dan menarik untuk memperoleh suara terbanyak dan memenangkan persaingan ini (Muhazir, 2020). Sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat beberapa tahapan yang harus dijalani oleh calon Kepala Desa, yakni (1) pendaftaran sebagai bakal calon, (2) seleksi administrasi, (3) pengumuman calon Kepala Desa, dan (4) kampanye.

Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan juga berdampak pada terbukanya ruang bagi desa untuk mengelola dan mengatur

urusan rumah tangganya sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada bagian ketentuan umum, terdapat Pasal 1 ayat 43 yang menyatakan bahwa (Rudiadi & Herawati, 2017):

Ini menjelaskan mengapa keberadaan aturan yang spesifik mengatur desa dan pengakuan desa oleh negara sangat penting, yang pada akhirnya menghasilkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Ada dua alasan utama mengapa kehadiran undang-undang desa ini menjadi sangat penting: Pertama, undang-undang desa diharapkan dapat membentuk dasar hukum yang jelas dan khusus untuk mengatur masalah desa. Sebelumnya, sejak reformasi, regulasi desa telah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kedua, melalui undang-undang desa, diharapkan akan ada inovasi baru dalam mendorong pembaharuan desa menuju demokratisasi, serta memperkuat semangat otonomi yang ingin diwujudkan dalam konstitusi. Salah satu aspek yang sangat menarik dan penting adalah ketentuan tentang pemilihan Kepala Desa, yang dijelaskan dalam Pasal 31 (Rudiadi & Herawati, 2017).

Kehadiran aturan yang merincikan proses pemilihan Kepala Desa semakin memperkuat semangat untuk menerapkan demokratisasi di seluruh wilayah Indonesia serta meningkatkan otonomi daerah. Untuk memperkuat kerangka aturan yang dibuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 112 Tahun 2014 diterbitkan secara khusus untuk mengatur proses pemilihan Kepala Desa.

Dalam Permendagri No. 112 Tahun 2014, terdapat beberapa aspek yang sangat penting untuk dipahami, terutama dalam BAB II mengenai proses pemilihan Kepala Desa, dan BAB III yang menetapkan tahapan pelaksanaan pemilihan. Pada BAB II tentang pemilihan Kepala Desa, Pasal 2 dan 3 memuat (Rudiadi & Herawati, 2017).

- 1) Pasal 2 menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa bisa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat dilakukan secara bertahap.
- 2) Pasal 3 menegaskan bahwa Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 akan dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa yang berada dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Dalam Permendagri No. 112 Tahun 2014, Pasal 5 menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota, yang dipimpin oleh Bupati, memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Panitia Pemilihan di tingkat Kabupaten. Selain itu, Peraturan tersebut juga menjelaskan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kelancaran pemilihan Kepala Desa. Salah satu tugas BPD adalah membentuk Panitia Pemilihan di tingkat desa (Rudiadi & Herawati, 2017).

Dalam proses kontestasi politik Pilkades, pentingnya memiliki modalitas tidak bisa diabaikan karena merupakan sumber energi dan kekuatan bagi calon untuk meraih kemenangan (Doe, dkk 2020). Terdapat tiga modalitas utama yang harus dimiliki oleh setiap calon kontestan, yaitu modal ekonomi, politik, dan sosial (Irsat, 2020; Febriansyah, dkk. 2021;

Jupri, 2021). Selain ketiga modalitas tersebut, terdapat juga empat modalitas lainnya, yakni modal ekonomi (kekayaan atau harta yang dimiliki oleh calon yang dapat memengaruhi pemilih), modal sosial (hubungan yang baik dengan pejabat politik dan jaringan kuat dengan tokoh masyarakat), modal budaya (pengetahuan tentang tata negara, bahasa, gelar akademik, dan kualifikasi pendidikan), serta modal simbolik (kehormatan dan karisma yang dimiliki sejak lahir yang dapat mempengaruhi orang lain) (Wance&Djae, 2019).

Dialektika antara konsep Habitus (Siregar, 2022) dan ranah ini menghasilkan pandangan bahwa terdapat aktivitas serupa dengan pasar kompetitif yang mengembangkan konsep modal dalam strategi mereka. Dalam konteks modal ekonomi, modal sosial, modal kultural, dan modal simbolik dikategorikan sebagai berikut. Di ranah intelektual, memiliki modal yang istimewa dan spesifik serta otoritas seperti prestasi, yang memungkinkan individu untuk menunjukkan tindakan dan pengaruh. Teori habitus memberikan strategi dan perilaku yang dapat disesuaikan dan beradaptasi dengan ranah intelektual ini. Dalam "pertarungan" sosial, individu dengan modal dan habitus yang sama mampu mempertahankan atau mengubah struktur, berbeda dengan mereka yang tidak memiliki modal. Dengan demikian, modal menjadi instrumen penting dalam menjaga kekuasaan politik. Penelitian ini menitikberatkan pada teori Habitus sebagai kerangka pemikiran utama (Siregar, 2022).

Pada tahun 2022, Desa Batang di Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, mengalami kontestasi politik dalam pemilihan Kepala Desa. Hasil rekapitulasi suara menunjukkan bahwa Hamzah Hafid, salah satu kandidat, terpilih sebagai Kepala Desa untuk periode 2022-2027. Keberhasilan Hamzah Hafid sebagai petahana dalam kontestasi tersebut didukung oleh beberapa modalitas, seperti modal ekonomi, modal sosial, modal kultural, dan modal simbolik. Hal ini terkait dengan interaksi sosial yang dibangunnya bersama masyarakat Desa Batang selama masa jabatan pertamanya sebagai Kepala Desa, di mana ia berhasil membangun reputasi yang baik dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga dapat terpilih kembali sebagai Kepala Desa. Modalitas ini sesuai dengan teori Habitus yang dimiliki oleh Hamzah Hafid dalam konteks kontestasi politik Pilkades, yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

#### **B. Modalitas Sosial Hamzah Hafid Dalam Kontestasi Politik (Studi Kasus Keterpilihan Kepala Desa Di Desa Batang)**

Modal ekonomi merupakan sumber daya yang dapat digunakan sebagai sarana produksi dan keuangan. Jenis modal ini dapat dengan mudah diubah menjadi berbagai bentuk modal lainnya. Modal ekonomi meliputi alat-alat produksi seperti mesin dan tanah, bahan-bahan materi seperti pendapatan dan barang-barang, serta uang. Semua jenis modal ini dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam konteks politik, modal ekonomi sering terlihat dalam bentuk uang yang digunakan untuk membiayai kampanye. Partai politik dan politisi berupaya meyakinkan masyarakat bahwa mereka memiliki perhatian, empati, dan

pemahaman yang tepat terhadap masalah bangsa serta berjuang untuk aspirasi rakyat. Untuk menyampaikan pesan ini, mereka menggunakan berbagai saluran promosi seperti televisi, lobi kepada organisasi massa, koran, radio, baliho, spanduk, sewa konsultan politik, dan pengumpulan massa, yang semuanya membutuhkan dana yang besar. Pada dasarnya, modal ekonomi merupakan konsep tradisional dalam pandangan Marxian yang mengacu pada penguasaan ekonomi.

Pandangan Marxian terhadap modal dianggap terlalu membatasi pemahaman terhadap dinamika sosial dalam masyarakat. Modal ekonomi dianggap sebagai modal yang dapat dengan langsung ditukar dan dimiliki oleh individu. Jenis modal ini dapat dengan langsung ditukar dan dimiliki sebagai hak milik individu. Modal ekonomi juga dianggap sebagai jenis modal yang relatif paling independen dan fleksibel karena dapat digunakan di berbagai ranah dan dapat diberikan atau diwariskan kepada orang lain.

Modal Budaya melibatkan seluruh kualifikasi intelektual yang dapat dihasilkan melalui pendidikan formal atau turun-temurun dari keluarga. Contohnya, kemampuan berbicara di depan publik, pemilihan benda-benda budaya berharga, pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh melalui pendidikan, serta sertifikat seperti gelar akademik. Modal Budaya juga mencakup preferensi terhadap budaya dan pola konsumsi, seperti seni, pendidikan, dan variasi bahasa. Modal Budaya berperan sebagai relasi sosial yang ada dalam sistem pertukaran, yang melibatkan segala jenis barang, materi, dan simbol, tanpa membedakan

antara barang langka atau umum, yang menunjukkan dirinya sebagai sesuatu yang layak dicari dalam konteks sosial tertentu.

Modal sosial adalah jenis sumber daya hubungan yang menentukan posisi sosial seseorang. Pierre Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai interaksi sosial yang memiliki nilai antara individu, seperti interaksi antar kelas dalam struktur sosial masyarakat. Modal sosial cenderung memengaruhi tiga hal utama. Pertama, modal sosial melibatkan institusi, norma, nilai-nilai, konvensi hidup, dan kode-kode perilaku. Kedua, pola pengelolaan modal sosial berkontribusi pada penciptaan kepaduan sosial. Ketiga, makna dari modal sosial tertentu melibatkan proses negosiasi dan adaptasi, yang mendorong individu lain untuk melakukan reinterpretasi terhadap modal yang dimiliki.

Modal sosial dapat diukur melalui tiga metode. Pertama, dukungan dari kelompok kolektif bagi seorang kandidat dapat diukur dari jumlah dukungan yang diterima oleh kandidat lain. Pengukuran ini mencakup dukungan individu terhadap dukungan kolektif yang mewakili individu tersebut. Kedua, ikatan personal antara seorang kandidat dan kelompok-kelompok di luar partai politik, seperti kelompok masyarakat setempat. Ketiga, modal sosial dapat diindikasikan melalui pengakuan nama seorang kandidat dalam asosiasinya. Modal sosial memiliki cakupan yang luas dan kompleks, mencakup berbagai faktor yang terdapat pada seseorang. Sebagai contoh, entitas seperti keluarga, organisasi, dan segala hal yang mendorong kolaborasi. Modal sosial ini menyoroti potensi kelompok dan pola interaksi antar individu dalam suatu kelompok dan di antara

kelompok, dengan fokus pada aspek-aspek seperti kepercayaan, jaringan norma, dan nilai-nilai yang menjadi standar dalam kelompok tersebut.

Modal simbolik adalah jenis sumber daya yang dimanfaatkan untuk memperoleh kekuatan simbolik, seringkali melibatkan simbol-simbol kekuasaan seperti jabatan, mobil mewah, kantor mewah, status tinggi, dan keturunan terhormat. Dengan kata lain, modal simbolik mencakup pengakuan oleh kelompok, baik secara institusional maupun non-institusional. Modal ini memiliki kekuatan untuk membentuk realitas, yang dapat mempengaruhi individu atau kelompok, partai politik, atau bahkan bangsa untuk mempercayai, mengakui, dan mengubah pandangan mereka tentang realitas. Proses kekuasaan simbolik terjadi ketika otonomi ranah melemah, sehingga agen dalam ranah tersebut muncul untuk menantang atau menggantikan doktrin yang ada. Pierre Bourdieu dalam Konsep Heterodoksa dan Ortodoksa menggambarkan bahwa "tantangan" secara eksplisit mempertanyakan keabsahan persepsi dan penilaian yang berlaku, sementara "ortodoksa" merujuk pada situasi di mana doktrin dikenali dan diterima dalam praktik. Kelompok dominan yang memiliki kekuasaan berusaha mempertahankan modal simbolik melalui akumulasi prestise, kehormatan, pengetahuan, dan pengakuan.

Modal simbolik tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan simbolik untuk memperoleh apa yang biasanya diperoleh melalui kekuasaan fisik dan ekonomi. Sebagai contoh, memiliki kantor yang luas, mobil dengan sopir, status tinggi, dan gelar pendidikan yang tercantum di kartu nama merupakan cara untuk menyambut tamu, menunggu, dan menegaskan otoritas seseorang. Modal

simbolik memiliki kekuasaan di dalam suatu ranah yang berbeda dengan kebutuhan modal di ranah lainnya. Kekuatan modal ekonomi seseorang dalam ranah kekuasaan efektif mampu bersaing. Dalam ranah bahasa, legitimasi diperlukan untuk modal kultural dan modal simbolik.

### 1. Modal ekonomi

Modal ekonomi merupakan sumber daya yang digunakan sebagai alat produksi dan keuangan. Jenis modal ini dapat dengan mudah diubah menjadi berbagai bentuk modal lainnya. Modal ekonomi melibatkan alat-alat produksi seperti mesin, tanah, dan tenaga kerja, juga termasuk pendapatan dan barang-barang materi, serta uang. Semua jenis modal ini dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam konteks politik, modal ekonomi terlihat dalam penggunaan uang untuk mendanai kampanye. Setiap partai politik atau politisi berupaya meyakinkan publik tentang kepedulian, empati, dan pemahaman yang benar terhadap masalah bangsa serta perjuangan untuk aspirasi rakyat. Untuk menyampaikan pesan ini, mereka menggunakan berbagai media promosi seperti televisi, lobby kepada organisasi massa, koran, radio, spanduk, dan lain-lain, yang semuanya membutuhkan biaya besar. Secara substansial, modal ekonomi merupakan konsep yang telah dikenal dalam tradisi Marxian, di mana bentuk-bentuk modal didefinisikan dengan merujuk pada penguasaan ekonomi.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Batang Kabupaten Bulukumba tentang Modal Ekonomi dalam konteks pencalonan saya sebagai calon Kepala Desa Batang, beliau menyatakan bahwa:

*“dari segi modal ekonomi, kalau persoalan modal ekonomi saya, pada saat mencalonkan periode pertama dek bisa di bilang lumayan, yang paling banyak*

*menguras itu konsumsi tim mulai pada saat pengusungan sampai pada terpilihnya saya ini yang sangat menguras dek, pada periode pertama tidak terlalu jhi dek kerna kebanyakan tim keluarga dekat sedangkan yang pencalonan periode kedua sudah banyak teman-teman dan masyarakat yang merapat kesaya sehingga konsumsi bertambah, kalau untuk alat peraga pemilu nda terlalu banyak dek palingan spanduk 5 lembar, kartu nama dan sebagainya, menurut saya nda terlalu banyak jhi palingan 1 jutaan jhi.(hasil wawancara dengan HH sebagai Kepala Desa terpilih, rabu 3 April 2024)*

Dari wawancara tersebut terlihat bahwa dalam pemilihan Kepala Desa Batang, penggunaan modal meningkat cukup signifikan pada periode kedua karena adanya peningkatan dalam pengeluaran tim.

Menurut wawancara dengan Sekretaris Desa Batang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, modal ekonomi dalam konteks pencalonan Hamza Hafid sebagai calon Kepala Desa Batang, dijelaskan bahwa:

*“kalau dari segi modal politik Kepala Desa terpilih dek kalau yang saya liat dek dia tidak menggunakan modal politik dalam pencalonannya karena masyarakat sangat mendukung Kepala Desa terpilih ini dek, Kepala Desa terpilih ini secara etitud sangat baik, sosialnya juga sangat baik kepada masyarakat, ini lah salah satu daya tarik Kepala Desa sehingga dia terpilih. (wawancara dengan A sebagai sekretaris Desa Batang, jumat 5 April 2024)*

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Batang mengindikasikan bahwa, menurutnya, modal yang digunakan oleh Kepala Desa terpilih tidak terlalu besar karena Kepala Desa terpilih dikenal sebagai sosok yang memiliki hubungan yang baik, etika yang tinggi, dan berkontribusi secara positif terhadap masyarakat.

Menurut hasil wawancara dengan seorang tokoh pemuda Desa Batang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, dalam konteks pencalonan Hamza Hafid sebagai calon Kepala Desa Batang, ia menyatakan bahwa:

*“dari segi modal ekonomi dalam sesuai dari penglihatan saya sebagai tokoh pemuda, bagi saya secara penglihatan saya Kepala Desa terpilih tidak memakai banyak uang dalam pencalonannya, yang saya liat cuman spanduk saja yang di*

*pajang sebagai alat peraga dalam pemilu, Kepala Desa terpilih ini adalah salah satu Kepala Desa yang bagus secara kebersamaan, dan bagus dalam merawat investasi sosial dilihat dari terpilihnya lagi di periode kedua. ( hasil wawancara dengan MI sebagai tokoh pemuda senin 8 April 2024)*

Hasil wawancara dengan seorang tokoh pemuda menunjukkan kesamaan pendapat dengan Sekretaris Desa Batang bahwa Kepala Desa terpilih tidak mengeluarkan banyak uang dalam pencalonannya sebagai Kepala Desa. Ini disebabkan oleh reputasi sosial yang baik serta investasi sosial yang efektif yang dilakukan oleh Kepala Desa terpilih, yang menjadi daya tarik utama sehingga dia terpilih kembali untuk periode kedua.

Menurut wawancara dengan masyarakat Desa Batang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, dalam konteks pencalonan Hamza Hafid sebagai calon Kepala Desa Batang, mereka menyatakan bahwa:

*“kalau saya melihat nak pak desa ini tidak pernah memakai uang dalam pemilihannya kerna ini pak desa orang baik tanpa uangpun dia akan terpilih, ini pak desa nak selalu menyumbang ketika ada acara kepemudaan dan acara-acara lainnya. ( hasil wawancara dengan O sebagai masyarakat Desa Batang rabu 10 April 2024)*

Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa Kepala Desa terpilih ini tidak memakai modal ekonomi karena Kepala Desa terpilih adalah orang baik yang selalu memberi sumbangan untuk kegiatan-kegiatan desa.

Hasil pembahasan dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa dari perspektif indikator modal ekonomi, penggunaan anggaran oleh Kepala Desa terpilih terlihat terbatas, hanya digunakan untuk kebutuhan tim seperti kopi dan lain-lain, serta untuk alat peraga seperti baliho dan kartu nama. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa terpilih dilihat sebagai

individu yang sangat baik dalam kehidupan sehari-harinya, berdasarkan hasil wawancara tersebut.

## 2. Modal Budaya

Modal Budaya merujuk pada totalitas kualifikasi intelektual yang dapat dihasilkan melalui pendidikan resmi maupun warisan keluarga. Contohnya termasuk kemampuan untuk tampil di depan umum, pilihan barang-barang budaya berharga, pengetahuan dan keahlian tertentu yang diperoleh melalui pendidikan, serta sertifikat seperti gelar akademik. Modal budaya ini dapat diartikan sebagai preferensi terhadap nilai-nilai budaya dan pola konsumsi, yang mencakup berbagai aspek seperti seni, pendidikan, dan bahasa.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Batang Kabupaten Bulukumba, dalam konteks pencalonan dirinya sebagai calon Kepala Desa Batang, ia menyatakan bahwa:

*“kalau persoalan modal budaya dek saya bukan orang budyawan saya juga tidak mempunyai gelar sarjana dan semacamnya, cuman kalau persoalan investasi sosial saya itu turun temurun kerna keluarga saya di Batang cukup dominan, kalau persoalan tampil di publik, saya sering tampil apalagi saya kan sudah 2 periode jadi kalau persoalan tampil berbicara di depan umum itu saya sudah terbiasa”*. (hasil wawancara dengan HH sebagai Kepala Desa terpilih, rabu 3 April 2024)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa modal budaya yang dimanfaatkan oleh Kepala Desa terpilih adalah kedominanan keluarganya di Desa Batang dan kemampuan berbicara di depan umum yang baik kepada masyarakat.

Menurut wawancara dengan Sekretaris Desa Batang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, dalam konteks pencalonan Hamza Hafid sebagai calon Kepala Desa Batang, ia menyatakan bahwa:

*“kalau persoalan modal budaya Kepala Desa adalah salah satu orang memiliki wibawa yang bagus, kebijaksanaan yang bagus dan juga sering tampil di semua kalangan masyarakat”* (wawancara dengan A sebagai sekretaris Desa Batang, jumat 5 April 2024).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Kepala Desa terpilih memiliki budaya yang dihormati dan memiliki kebijaksanaan yang sangat baik, serta aktif berpartisipasi di semua lapisan masyarakat.

Hasil wawancara dengan tokoh pemuda Desa Batang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, mengenai modal budaya dalam pencalonan Hamza Hafid sebagai calon Kepala Desa Batang, menyatakan bahwa:

*“lagi-lagi saya katakan bahwa Kepala Desa Batang adalah salah satu Kepala Desa yang menjunjung tinggi kekeluargaan, serta memiliki pengetahuan tentang adat bermasyarakat yang baik juga sering bercengkrama dengan kami para pemuda desa Batang, sebagai bentuk menghidupkan kepemudaan di desa Batang”* (hasil wawancara dengan MI sebagai tokoh pemuda senin 8 April 2024)

Dari hasil wawancara tersebut tergambar bahwa modal budaya Kepala Desa Batang meliputi sikap kekeluargaan dalam tindakan pemerintahannya, pengetahuan tentang adat dan kehidupan berkomunitas, serta sering berinteraksi dengan pemuda di Desa Batang dengan tujuan memperkuat kepemudaan yang positif dan dapat diandalkan.

Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Batang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, mengenai modal budaya dalam pencalonan Hamza Hafid sebagai calon Kepala Desa Batang, menyatakan bahwa:

*“kalau persoalan budaya nak, Kepala Desa Batang juga banyak tau tentang adat istiadat di sini nak, dia tau memposisikan diri bagaimana bersikap dengan kami masyarakat miskin, dan bagaimana bersikap dengan kalangan atas nak, kami sangat menghormati Kepala Desa Batang karena dia adalah orang baik dan*

*berwibawa, memang cocoki jadi Pakde”* ( hasil wawancara dengan O sebagai masyarakat Desa Batang rabu 10 April 2024).

Kesimpulan dari pembahasan tersebut menunjukkan bahwa modal budaya yang dimiliki oleh Kepala Desa terpilih adalah kesetaraan dalam memperlakukan masyarakat serta pemahaman yang baik tentang posisi diri dalam lingkungan tersebut.

Hasil analisis tentang Modal Budaya menunjukkan bahwa Kepala Desa terpilih memiliki beberapa karakteristik yang mencerminkan modal budaya yang kuat. Ini mencakup kedekatan dengan keluarga yang memiliki pengaruh besar di Desa Batang, kemampuan berbicara di depan publik yang baik, serta kehadiran yang konsisten di semua lapisan masyarakat. Selain itu, ia juga dikenal memiliki kewibawaan yang kuat, kebijaksanaan yang cermat, dan sering terlibat dalam kegiatan sosial dan budaya masyarakat setempat. Selain itu, ia menunjukkan sikap kekeluargaan dalam menjalankan pemerintahan dan memiliki pemahaman yang baik tentang adat dan budaya masyarakat. Selalu berinteraksi dengan pemuda di Desa Batang, dengan tujuan membangun kepemudaan yang kuat dan dapat diandalkan, serta menunjukkan sikap yang adil tanpa membeda-bedakan masyarakat dan memiliki pemahaman yang baik tentang tempatnya dalam masyarakat.

### **3. Modal sosial**

Modal sosial adalah jenis sumber daya yang memengaruhi penentuan posisi sosial seseorang dalam masyarakat. Pierre Bourdieu menganggap modal sosial sebagai hubungan sosial yang bernilai antara individu.

Contohnya adalah interaksi antar kelas dalam masyarakat. Modal sosial cenderung menghindari pembiasaan dalam tiga aspek utama. Pertama, modal sosial mencakup institusi, norma, nilai, konvensi hidup, dan kode-kode perilaku. Kedua, pola pengelolaan modal sosial berkontribusi pada terciptanya kepaduan sosial. Ketiga, makna dari modal sosial tertentu terlibat dalam proses negosiasi dan adaptasi, mengarah pada tindakan reinterpretatif terhadap modal yang dimiliki individu.

Menurut wawancara dengan Kepala Desa Batang Kabupaten Bulukumba, jika melihat modal sosial dalam pencalonan sebagai calon Kepala Desa Batang, Kepala Desa tersebut menyatakan bahwa:

*“Kalau persoalan sosial memang saya rawat dari dulu dek malahan saya pernah merantau kekalimantan, saya di telepon oleh salah satu keluarga saya menyuruh saya pulang ke kampung untuk mencalonkan Kepala Desa terus saya jawab buat apa saya pulang kalau tidak bersatu keluarga, setelah perdebatan panjang saya, kesimpulan saya dapat bahwa keluarga serta para sahabat saya yang menyuruh saya pulang dan akhirnya saya pun pulang, setelah saya sampai saya di kampung saya mencalonkan dan akhirnya saya menang dan menduduki jabatan Kepala Desa dan alhamdulillah saya sekarang menjabat 2 periode, jadi dek prinsip saya apa yang kau tanam akan maka kau yang akan memetik buahnya sendiri”.*(hasil wawancara dengan HH sebagai Kepala Desa terpilih, rabu 3 April 2024)

Hasil wawancara tersebut mengindikasikan bahwa dari perspektif modal sosial, Kepala Desa terpilih didukung oleh keluarga dan sahabat yang menjadi faktor utama dalam keputusannya untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.

Menurut hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Batang, dalam konteks pencalonan Hamza Hafid sebagai calon Kepala Desa Batang, modal sosialnya adalah didukung oleh jejaring keluarga dan komunitas yang memainkan peran penting dalam mendukung pencalonannya.

*“Modal sosial pak Hamzah adalah partisipasi dia sebagai calon yang keren menurut saya di buktikan dengan jumlah suara yang mencapai 90% dari total dpt yang ada didesa Batang dek, nda mauna ja na ambil semua dek , kenapa banyak suaranya kerna partisipasi ke masyarakat yang sangat bagus mulai gotong royongnya, partisipasi kegiatan dengan kepemudaan desa Batang dan lain-lain, juga pak Hamzah ini adalah orang sderhana juga bisa dibilang salah satu tokoh masyarakat disini dek, kayaknya juga dia bukan orang yang berada dek, jadi enak masuk-masuk nya ke masyarakata dek”.*( hasil wawancara dengan MI sebagai tokoh pemuda senin 8 April 2024)

Hasil wawancara tersebut mengindikasikan bahwa modal sosial Kepala Desa terpilih dilihat dari keterlibatannya dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Sebagai salah satu tokoh masyarakat di Batang, partisipasi aktifnya merupakan faktor yang membuat Hamza Hafid berhasil terpilih sebagai Kepala Desa Batang dengan meraih 90% suara dari total daftar pemilih tetap Desa Batang.

Hasil wawancara dengan tokoh pemuda Desa Batang menunjukkan bahwa modal sosial dalam pencalonan Hamza Hafid sebagai Kepala Desa Batang terlihat dari keterlibatannya dalam kegiatan-kegiatan pemuda dan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kemenangan Hamza Hafid sebagai Kepala Desa, karena dukungan yang diberikan oleh kalangan pemuda di desa tersebut.

*“Kalau persoalan sosial nya pak desa, menurut saya bagus kerna jujur saja saya melihat di di terima di oleh anak muda desa Batang dengan baik, juga dia adalah salah satu orang yang di tuakan oleh kami para pemuda, pakde juga adalah orang yang bijak dalam mengambil keputusan sehingga dia di contoh oleh kalangan pemuda, juga mampu menempatkan posisi, kapan harus bersenda gurau, kapan harus serius”.* ( hasil wawancara dengan MI sebagai tokoh pemuda senin 8 April 2024)

Hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa modal sosial Kepala Desa terlihat dari reputasi yang dimilikinya di kalangan pemuda, yang tercermin dari partisipasinya dalam kegiatan kepemudaan di Desa Batang.

Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Batang mencerminkan modal sosial Hamza Hafid sebagai calon Kepala Desa Batang.

*“Saya nak kalau pak desa mau di cerita singkat jhi nak, pak desa adalah orang yang sangat cocok menjadi pemimprn di desa ini, itu jhi nak, ini pak desa cocok memang kerna dari perilakunya yang saya liat nak, tidak pernah meninggikan diri kalau duduk-duduk di masyarakat banyak, tidak pernah sombong kalau cerita dan selalu sopan pada semua orang nak inilah salah satu orang tau yang cocok memimpin des Batang menurutku nak”* ( hasil wawancara dengan O sebagai masyarakat Desa Batang rabu 10 April 2024).

Hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa modal sosial yang dimiliki oleh Kepala Desa terpilih dapat dilihat dari perilakunya di masyarakat yang menunjukkan ketidakpembagian kelas. Ini terlihat dari kesaksian seorang warga yang menyatakan bahwa Kepala Desa terpilih, dengan sopan santunnya, memperlakukan semua orang di Desa Batang tanpa membeda-bedakan.

Dari analisis modal sosial, terlihat bahwa Kepala Desa terpilih didorong oleh dukungan dari keluarga dan sahabatnya untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa. Partisipasinya dalam kegiatan masyarakat serta pengakuan sebagai tokoh masyarakat di Desa Batang turut berperan dalam kemenangannya dengan perolehan suara mencapai 90% dari total daftar pemilih tetap di Desa Batang. Selain itu, modal sosial Kepala Desa terpilih tercermin dalam pengakuan dari kalangan pemuda, dimana partisipasinya dalam kegiatan kepemudaan memperkuat posisinya. Lebih lanjut, perilaku sopan santun dan kesederhanaannya di masyarakat, tanpa membeda-bedakan kelas sosial, merupakan bukti modal sosial yang kuat dalam kepemimpinannya, seperti yang diungkapkan oleh salah satu warga Desa Batang.

#### 4. Modal simbolik

Modal simbolik adalah bentuk sumber daya yang dimaksimalkan untuk meraih kekuasaan simbolik, sering kali menggunakan simbol-simbol kekuasaan seperti jabatan, mobil mewah, kantor berprestise, status sosial tinggi, dan hubungan dengan keluarga yang terkenal. Ini dimaksudkan sebagai bentuk pengakuan oleh kelompok, baik secara resmi maupun tidak resmi. Modal simbolik memiliki kekuatan untuk membentuk realitas dan mempengaruhi orang untuk mempercayai, mengakui, dan mengubah pandangan mereka tentang realitas, baik individu maupun kelompok, serta partai politik atau bangsa. Proses kekuasaan simbolik terjadi ketika otonomi ranah lemah, yang menghasilkan munculnya agen di ranah tersebut untuk menantang atau menggantikan doktrin yang ada. Konsep heterodoks dan ortodoks dalam pemikiran Pierre Bourdieu mengilustrasikan dinamika ini, di mana yang heterodoks secara eksplisit mempertanyakan validitas persepsi yang dominan, sementara yang ortodoks adalah situasi di mana persepsi dominan diakui dan diterima. Modal simbolik mencakup akumulasi prestise, kehormatan, pengetahuan, dan pengakuan sosial.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Batang di Kabupaten Bulukumba, terlihat bahwa modal simbolik dalam pencalonannya sebagai Kepala Desa Batang adalah berupa pengakuan atas jabatan dan posisinya dalam masyarakat, serta koneksi dan reputasi yang dimilikinya.

*Kalau persoalan modal simbolik dek sesuai dengan penjelasnta, saya adalah orang yang suka bergabung dengan masyarakat manapun kalangan manapun, saya sering ngopi dengan mereka, saya sering ikut berunding apa bila ada masalah maupun ada kegiatan yang sedang di rancang, partisipasi adalah kunci bagi orang yang ingin mencalonkan sebagai pemerintah dek, itu saja yang bisa*

*katakan, kerna kalau saya jelaskan lebih jauh juga saya tidak jamin adek juga percaya, biarkan periode saya yang tentukan dek..(hasil wawancara dengan HH sebagai Kepala Desa terpilih, rabu 3 April 2024)*

Hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa modal simbolik Kepala Desa terpilih adalah hasil dari investasi sosial yang dibangun melalui interaksi dengan berbagai lapisan masyarakat, serta partisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan komunitas yang dijaga dengan baik.

Menurut wawancara dengan Sekertaris Desa Batang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, modal simbolik yang terlihat dalam pencalonan Hamzah Hafid sebagai calon Kepala Desa Batang adalah adanya pengakuan dan reputasi yang kuat di masyarakat, terutama melalui partisipasinya dalam kegiatan sosial dan keterlibatan dalam berbagai aspek kehidupan komunitas.

*“Seperti yang sudah saya jelaskan tadi dek bahwa pakde ini adalah salah satu orang yang di tokohkan, pakde juga memiliki partisipasi yang baik begi semua kegiatan masyarakat, juga pakde adalah orang yang pantas di contoh kebijakannya yang tidak pernah menekan masyarakatnya di lihat dari cara pemerintahannya yang menurut saya demokratis sekali dek, salah satu yang yang berjuang dari nol jatuh bangun sudah pakde rasakan bahkan pernah mi merantau, dan alhamdulillah dia terpilih dan menjabat Kepala Desa Batang dan sekarang periode yang kedua.”.( hasil wawancara dengan MI sebagai tokoh pemuda senin 8 April 2024)*

Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa modal sosial yang dimiliki oleh Kepala Desa terpilih tercermin melalui pengakuan dan reputasi Hamza Hafid di masyarakat Desa Batang, serta kebijakan-kebijakan yang dibuatnya berdasarkan kebutuhan dan partisipasi masyarakat, serta bersifat demokratis.

Hasil wawancara dengan tokoh pemuda Desa Batang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, menunjukkan bahwa modal simbolik

dalam pencalonan Hamza Hafid sebagai calon Kepala Desa Batang tercermin dari keterlibatan dan reputasi yang dimilikinya di kalangan pemuda Desa Batang. Mengatakan bahwa:

*“Modal simbolik pakde kalau kami pemuda dia adalah orang yang pantas menjadi pemimpin walaupun sekarang hanya Kepala Desa, dia pemimpin yang cukup baik, mulai dari caranya mengambil keputusan, juga kebijakannya yang tidak pilih kasih dan juga dia adalah orang cukup baik dalam bermasyarakat”*(hasil wawancara dengan MI sebagai tokoh pemuda senin 8 April 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, modal simbolik Kepala Desa Batang sejalan dengan pandangan Sekretaris Desa Batang yang menyatakan bahwa Hamza Hafid memiliki karakter yang kuat, dan kebijakan yang diterapkan oleh Kepala Desa terpilih mendapat dukungan positif dari masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Batang, terlihat bahwa modal simbolik dalam pencalonan Hamza Hafid sebagai calon Kepala Desa Batang adalah dilihat dari reputasi dan citra yang baik di mata masyarakat.

*“Nda ku tau apa di bilang simbolik nak, tapi kalau pak desa mau di cerita pokoknya dia adalah pemimpin yang menurut kami baik secara tutur kata, baik secara perilaku dan baik secara estetika dan etika”*( hasil wawancara dengan O sebagai masyarakat Desa Batang rabu 10 April 2024).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa modal simbolik Kepala Desa terpilih sesuai dengan persepsi masyarakat Desa Batang tentang karakter yang baik yang dimiliki oleh Kepala Desa Batang.

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa modal simbolik Kepala Desa terpilih adalah hasil dari upaya investasi sosial yang dibangun melalui interaksi dengan berbagai lapisan masyarakat, serta partisipasi aktif dalam kegiatan komunitas. Kepala Desa terpilih, Hamza Hafid, berhasil

mendapatkan dukungan dari masyarakat Desa Batang melalui penampilannya yang mencerminkan karakter yang baik. Selain itu, kebijakan yang dibuat oleh Kepala Desa terpilih didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan bersifat demokratis. Ini sejalan dengan pandangan Sekretaris Desa Batang yang menyatakan bahwa Hamza Hafid memiliki karakter yang baik dan kebijakan yang progresif terhadap masyarakat. Kesimpulan tersebut juga sejalan dengan pendapat masyarakat Desa Batang yang menganggap bahwa Kepala Desa Batang memiliki karakter yang baik, seperti yang dijelaskan oleh responden.



## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dari temuan penelitian ini adalah:

Dari segi indikator modal ekonomi, penggunaan anggaran oleh Kepala Desa terpilih menunjukkan bahwa dia hanya mengalokasikan dana untuk keperluan tim, seperti pembelian kopi dan item lainnya, serta untuk alat promosi seperti baliho dan kartu nama. Dari perspektif indikator modal budaya, terlihat bahwa Kepala Desa yang terpilih memiliki keluarga yang memiliki pengaruh besar di Desa Batang, memiliki kemampuan public speaking yang baik, kebijaksanaan yang terbukti, serta aktif berpartisipasi di semua lapisan masyarakat. Selain itu, dia juga menunjukkan sikap kekeluargaan dalam menjalankan pemerintahan dan memiliki pengetahuan tentang adat dan kebiasaan masyarakat. Dari perspektif modal sosial, terlihat bahwa Kepala Desa yang terpilih mendapat dukungan kuat dari keluarga dan sahabat yang memotivasi Hamza Hafid untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa. Selain itu, partisipasinya dalam kegiatan masyarakat juga cukup signifikan. Hamza Hafid berhasil terpilih sebagai Kepala Desa Batang dengan perolehan suara mencapai 90% dari total hak pilih di Desa Batang. Modal sosial yang dimiliki oleh Kepala Desa ini juga tercermin dari penerimaannya di kalangan pemuda, yang terlihat dari keterlibatannya dalam kegiatan kepemudaan di Desa Batang. Dari perspektif modal simbolik, Kepala Desa yang terpilih membangun investasi sosial dengan berinteraksi dengan semua lapisan masyarakat dan aktif dalam kegiatan-kegiatan komunitas. Terpilihnya Hamza

Hafid sebagai Kepala Desa Batang didasarkan pada pengakuan sosialnya di tengah-tengah masyarakat Desa Batang, serta kebijakan-kebijakan yang dibuatnya yang berdasarkan pada kebutuhan dan bersifat demokratis. Hal ini sejalan dengan pendapat Sekretaris Desa Batang yang menyatakan bahwa Hamza Hafid memiliki reputasi yang baik dan kebijakan yang progresif untuk kepentingan masyarakat.

## **B. Saran**

1. Pentingnya melakukan penyebaran informasi mengenai kemajuan desa Batang, termasuk dalam hal pembangunan, ekonomi, dan pendidikan.
2. Diperlukan keterbukaan mengenai penggunaan dana desa Batang kepada masyarakat dan platform media sosial, sambil juga meningkatkan perkembangan lembaga-lembaga masyarakat dan organisasi kepemudaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. & Hamdi, R. A. 2020. *Modal Sosial Parabela dalam Mendukung Kemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Pasca Orde Baru*. Moderat. *Junal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. 6(4).666-682. Doi: 10.25157/moderat.v6i4.3792.
- Andriani, A. & Wardani, S. B. E. 2021. *Peran Modal Politik dan Modal Sosial Pencalonan Suryana dan Wiwin Suwindaryati melalui Jalur Perseorangan pada Pilkada Kabupaten Garut Tahun 2018*. *Polikrasi: Journal of Politic and Democracy* 1(1) 28-45. <https://idereach.com/journal/index.php/polikrasi>.
- Arbi, P. Ibrahim, & Murtasidin, B. 2023. *Modalitas Politik Incumbent di Pilkada (Studi terhadap Kemenangan Aminanto di Pilkada Sidoharjo-Bangka Selatan)* *Jurnal Ideas. Pendidikan, Sosial dan Budaya*. 9(1).171-178. Doi: 10.32884/ideas.v9i1.1227.
- Ciptono & Pujileksono, S. 2021. *Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Pertukaran Sosial (Studi Kasus pada Pemilihan Kepala Desa Sumberarum 2019 Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban*. *Juispol: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 1(1).31-41. Doi: 10.30742/juispol.v1i1.1562.
- Darmawan, F. 2018. *Modalitas Visual Komunikasi Politik Iklan*. *Mediatur: Jurnal Komunikasi*. 11 (1) 56-65.
- Doe, H. Muhammad, Sukri & Suriana. 2020. *Pemanfaatan Modal Sosial Appi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar*. *Jurnal Politik Protetik*. 8(2).296-312. Doi: 10.24252/protetik.v8i2a6.
- Fatchan, H. A. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Jenggala Pustaka Utama.
- Febriansyah, H. Ropik, A. & Kawwami, A. M. 2021. *Optimalisasi Modal dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Desa: Studi Kasus*. *Jurnal Intelektualita Keislaman, Sosial dan Sains* 10(1) 201-205. Doi: 10.19109/intelektualita.v10i1.18784.
- Irsat, 2022. *Peran Modalitas dalam Pemasaran Politik Syamsari Kitta dan Achmad Daeng Se're dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017*. *Gema Kampus IISIP Yapis Biak*. 17(1) 39-45. Doi: 10.52049/gemakampus.v17i1.228.
- Jupri, 2021. *Kekuatan Modal Sosial dalam Konsestasi Politik Pemilihan Kepala Desa*. Tesis Tidak Diterbitkan: Universitas Hasanuddin Makassar.
- Muhazir, A. 2020. *Strategi Political Marketing Kandidat dalam Pilkadaes Serentak Periode III di Kabupaten Klaten Jawa Tengah*. *AGUNA: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1(1) 1-19. <http://ejournal.amikompurwokerto.ac.id/index.php/AGUNA>.
- Pantouw, S. M. I. 2012. *Modalitas dalam Kontestasi Politik (Studi tentang Modalitas dalam Kemenangan Pasangan Hanny Sondakh dan Maximiliaan*

- Lomban pada Pemilukada di Kota Bitung Sulawesi Utara Tahun 2010*). Tesis Tidak Diterbitkan. Universitas Diponegoro Semarang.
- Peraturan Pemerintah, Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri, Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 5-6.
- Putnam, R. 2000. *Bowling Alone. America's Declining Social Capital*. [http://muse.jhu.edu/demo/journal at democracy/v0061putnam.html](http://muse.jhu.edu/demo/journal%20at%20democracy/v0061putnam.html).
- Putra, F. A. & Hanafie, H. 2021. *Modal Sosial dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) (Studi terhadap Tokoh Wandi sebagai Calon Kepala Desa di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Jawa Barat Tahun 2019*. *Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global*. 2(2).11-16. Doi: 10.24853/independen.2.2.11-16.
- Qadri, G. M. 2018. *Modalitas Kemenangan M. Husni Djibril pada Pemilihan Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2015*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.
- Rahmatullah, A. F. 2021. *Romi Haryanto Effect: Sebuah Fenomena Kemenangan Petahana Independen*. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)* 3(1).1-14. Doi: 10.18196/jpk.v3i1.12928.
- Rudiadi, & Herawati, R. (2017). PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DESA (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau). *Law Reform*, 13(1). <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15956>
- Ramadani, Nasution, I. & Tarigan, U. 2018. *Analisis Memilih Kepala Desa Serentak terhadap Demokrasi Lokal di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang*. *Perspektif Universitas Medan Area*. 7(2). Doi: 10.31289/perspektif.v7i2.2512.
- Rizki, D. Amalatulwalidain, & Kencana, N. 2022. *Kontestasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Camabi Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten OKI Sumatera Selatan Tahun 2021*. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. 2(4).477-494. Doi: 10.36418/comserva.v2i4.348.
- Salbari, A.R. Juantara, B. & Kurniawan, R. C. 2022. *Modalitas Yusran Amrullah dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020*. *Jurnal Studi Ilmu sosial dan Politik (Jasispol)*. 2(1).65-73. Doi: 10.35912/jasispol.v2i1.1559.
- Santoso, T. 2020. *Memahami Modal Sosial*. Surabaya: Pustaka Saga.
- Sholikin, A. 2020. *Strategi Politik Lurah Incumbent dalam Pilkades di Desa Tambang Minyak. (Studi kasus di Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro)*. *Journal of Social and Governance*. 2(1).32-40. Doi: 10.24076/jspg.2020v2i1.180.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, T. I. Resmawan, E. & Surya, I. 2019. *Strategi Pemenangan Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Santan Tengah kecamatan*

- Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016*. eJournal Pemerintahan Integratif 7(1).52-61.
- Siregar, L. U. (2022). *Politik kekerabatan dalam kemenangan andar amin harahap pada pemilihan bupati di kabupaten padang lawas utara tahun 2018*. Univeraitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam - Banda Aceh.
- Ukhwaluddin, A. F. & Subekti, V. S. 2022. *Politik Pencalonan Pasangan Suami Istri pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Sekaran Kabupaten Bojonegoro dan Desa Lembor Kabupoaten Lamongan*. Journal of Gocernance and Local Politic (. JGLP) 4(1).22-32. Doi: 10.47650/gglp. V4i1.404.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 31-39.
- Upe, A. Nur, M. J. & Suaib, E. 2022. *Kontestasi Politik Kekerabatan dalam Pemilihan Kepala Desa: Konteks Masyarakat Bugis*. Indonesian Annual Conference Series Vol.1 2022. Proceedings of the 1<sup>st</sup> Conference Social Politic and Culture (IACS-CSPC 2022).
- Vikalista, E. Wati, M. R. & Anwar, T. 2020. *Mengungguli Sang Petahana: Kemenangan Sukamta-Abdi Rahman dalam Pilkada di Kabupaten Tanah Laut 2018*. Prosising Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah. 5(1). 102-111.
- Wance, M. & Djae, R. M. 2019. *Modalitas Dinasti Ahmad Hidayat Mus pada Pemilihan Kepala Daerah di Maluku Utara 2018*. Sosiohumaniora. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora. 21(3).256-268. Doi: /10.24198/sosiohumaniora.v2.1i3.21547.

**LAMPIRAN**

**DOKUMENTASI**

**Dokumentasi dengan Kepala Desa Batang Terpilih**



**Dokumentasi Dengan Tokoh Pemuda**



### Dokumentasi Dengan Masyarakat Desa Batang



### Dokumentasi Dengan Sekertaris Desa Batang



### Dokumentasi Dengan Salaha Satu Pemuda





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 3941/05/C.4-VIII/III/1445/2024

21 March 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

11 Ramadhan 1445

Hal : Permohonan Izin Penelitian

*Kepada Yth,*

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0284/FSP./A.6-VIII/III/1445/2024 tanggal 21 Maret 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **RURUL ASHARI**

No. Stambuk : **10564 1101418**

Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"MODALITAS SOSIAL HAMZAH HAFID DALAM KONTESTASI POLITIK (STUDI KASUS KETERPILIHAN KEPALA DESA DI DESA BATANG)"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 27 Maret 2024 s/d 27 Mei 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,



**Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.**

**NBM 1127761**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : **6922/S.01/PTSP/2024** Kepada Yth.  
Lampiran : - Bupati Bulukumba  
Perihal : **Izin penelitian**

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3941/05/C.4-VIII/III/1445/2024 tanggal 21 Maret 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **RURUL ASHARI**  
Nomor Pokok : 105641101418  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" MODALITAS SOSIAL HAMZAH HAFID DALAM KONTESTASI POLITIK (STUDI KASUS KETERPILIHAN KEPALA DESA DI DESA BATANG) "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **27 Maret .d 27 Mei 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 22 Maret 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar} di Makassar;
2. *Pertinggal.*



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Rurul Ashari

Nim : 105641101418

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	22 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 10 Juni 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursyah, S. Hum., M.I.P  
NBM. 964 591

# BAB I Rurul Ashari

## 105641101418

*by Tahap Tutup*



**Submission date:** 08-Jun-2024 04:13PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2398145915

**File name:** BAB\_I\_RURUL\_2.docx (34.22K)

**Word count:** 1188

**Character count:** 7838

# BAB I Rurul Ashari 105641101418

## ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	3%
2	desaciwidey.wordpress.com Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Negeri Medan Student Paper	2%
4	id.123dok.com Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches  < 2%

# BAB II Rurul Ashari

## 105641101418

*by Tahap Tutup*



**Submission date:** 08-Jun-2024 04:14PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2398145997

**File name:** bab\_2\_-\_2024-06-08T172258.279.docx (51.12K)

**Word count:** 2309

**Character count:** 15416

## BAB II Rurul Ashari 105641101418

### ORIGINALITY REPORT

**22%**

SIMILARITY INDEX

**28%**

INTERNET SOURCES

**6%**

PUBLICATIONS

**4%**

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	5%
2	<a href="http://jurnal.pancabudi.ac.id">jurnal.pancabudi.ac.id</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://journal.stieamkop.ac.id">journal.stieamkop.ac.id</a> Internet Source	3%
4	<a href="http://repository.stienobel-indonesia.ac.id">repository.stienobel-indonesia.ac.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://repository-feb.unpak.ac.id">repository-feb.unpak.ac.id</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://garuda.kemdikbud.go.id">garuda.kemdikbud.go.id</a> Internet Source	2%
7	<a href="http://j-innovative.org">j-innovative.org</a> Internet Source	2%
8	<a href="http://ejournal.uika-bogor.ac.id">ejournal.uika-bogor.ac.id</a> Internet Source	2%
9	<a href="http://jurnalfe.ustjogja.ac.id">jurnalfe.ustjogja.ac.id</a> Internet Source	2%



turnitin

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



# BAB III Rurul Ashari

## 105641101418

*by Tahap Tutup*



**Submission date:** 08-Jun-2024 04:14PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2398146104

**File name:** BAB\_III\_RURUL\_2.docx (55.31K)

**Word count:** 641

**Character count:** 4322

# BAB III Rurul Ashari 105641101418

## ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://ojs.unm.ac.id">ojs.unm.ac.id</a> Internet Source		2%
2	<a href="http://repositori.unsil.ac.id">repositori.unsil.ac.id</a> Internet Source		2%
3	<a href="http://andirachmat93.blogspot.com">andirachmat93.blogspot.com</a> Internet Source		2%
4	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source		2%
5	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source		2%
6	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source		2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

# BAB IV Rurul Ashari

## 105641101418

by Tahap Tutup



**Submission date:** 08-Jun-2024 04:15PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2398146238

**File name:** BAB\_IV\_RURUL\_2.docx (268.26K)

**Word count:** 5774

**Character count:** 36537

# BAB IV Rurul Ashari 105641101418

## ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source		3%
2	<a href="http://repositori.unsil.ac.id">repositori.unsil.ac.id</a> Internet Source		2%
3	Submitted to Universitas Muhammadiyah Makassar Student Paper		2%
4	<a href="http://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a> Internet Source		2%

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 2%

# BAB V Rurul Ashari

## 105641101418

*by Tahap Tutup*



**Submission date:** 08-Jun-2024 04:15PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2398146434

**File name:** BAB\_V\_RURUL\_2.docx (30.39K)

**Word count:** 295

**Character count:** 1955

# BAB V Rurul Ashari 105641101418

## ORIGINALITY REPORT

**3%**

SIMILARITY INDEX

**3%**

INTERNET SOURCES

**0%**

PUBLICATIONS

**0%**

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

**1**

**cakrawala.co**

Internet Source



**3%**



Exclude quotes  Off

Exclude matches  Off

Exclude bibliography  Off



## RIWAYAT HIDUP



Rurul Ashari, lahir di Salibang Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba pada tanggal 28 Maret 1998. Penulis merupakan anak pertama atau anak tunggal. Penulis menempuh jenjang pendidikan sekolah dasar pada tahun 2003 dan tamat pada tahun 2009 di SD negeri 127 Bontoa Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba kemudian pada tahun yang sama masuk ke SMP Negeri 25 Bulukumba dan tamat pada tahun 2012 pada tahun yang sama masuk di SMA negeri 11 Bulukumba dan tamat pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada jurusan ilmu Pemerintahan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Strata Satu (S1). Pada tahun 2024, penulis menyelesaikan studi dengan karya ilmiah yang berjudul “Modalitas Hamzah Hafid Dalam Kontestasi Politik (Studi Keterpilihan Kepala Desa Di Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba).